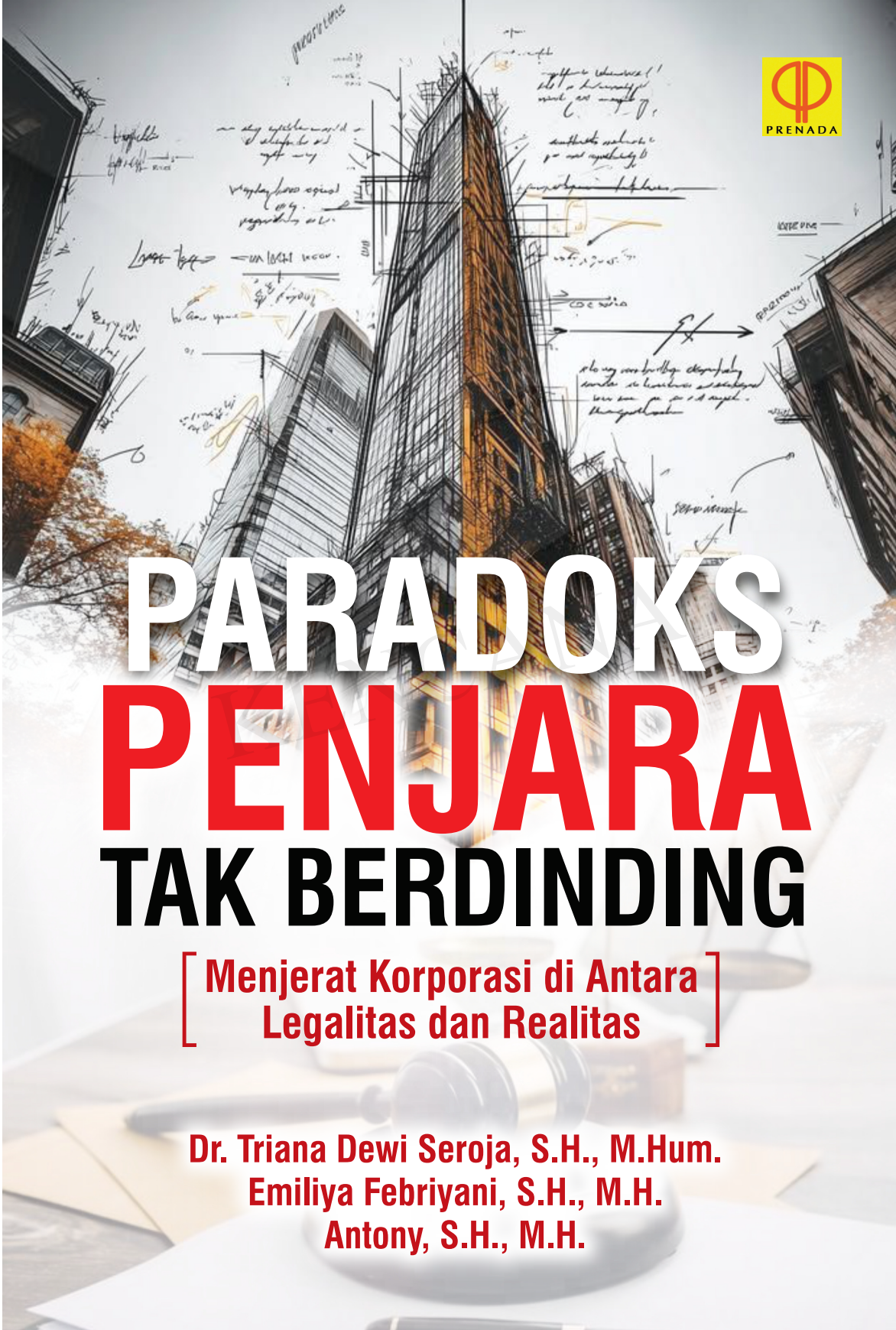




PARADOKS PENJARA TAK BERDINDING

[Menjerat Korporasi di Antara
Legalitas dan Realitas]

Dr. Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum.
Emiliya Febriyani, S.H., M.H.
Antony, S.H., M.H.

PARADOKS PENJARA TAK BERDINDING

[Menjerat Korporasi di Antara
Legalitas dan Realitas]

KENCANA

KENCANA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,-(empat miliar rupiah).

PARADOKS PENJARA TAK BERDINDING

**[Menjerat Korporasi di Antara
Legalitas dan Realitas]**

KENCANA

**Dr. Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum.
Emiliya Febriyani, S.H., M.H.
Antony, S.H., M.H.**



**PARADOKS PENJARA TAK BERDINDING:
MENJERAT KORPORASI DI ANTARA LEGALITAS DAN REALITAS**

Edisi Pertama

Copyright © 2026

ISBN 978-602-383-242-2

15,5 x 23 cm

xviii, 318 hlm

Cetakan ke-1, Februari 2026

Prenada. 2026.0267

Penulis

Dr. Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum.

Emiliya Febriyani, S.H., M.H.

Antony, S.H., M.H.

Editor

Nadia Carolina Weley, S.H., M.H.

Hanifah Ghafila Romadona, S.H., M.H.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Lintang Novita & Iam Maher

Penerbit

PRENADA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

KATA PENGANTAR

Dr. Iskandar Itan, S.E., M.M.

Rektor Universitas Internasional Batam

Buku *Paradoks Penjara Tak Berdinding: Menjerat Korporasi di Antara Legalitas dan Realitas* hadir sebagai karya yang sangat relevan di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Melalui pembahasan yang komprehensif, buku ini menguraikan bagaimana kejahatan korporasi bukan lagi isu tersembunyi, melainkan bagian nyata dari dinamika hukum yang menuntut perhatian serius. Buku ini menyajikan pandangan luas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai aspek hukum nasional maupun internasional.

Sebagai pembaca non-akademisi hukum, saya melihat buku ini sangat cocok menjadi bahan bacaan utama bagi mahasiswa hukum. Struktur pembahasan yang sistematis dari konsep dasar hingga pendekatan kontemporer, menjadikan buku ini sebagai referensi yang kuat untuk memperkaya pemahaman akademik dan praktik. Semoga kehadiran buku ini tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga mendorong terbentuknya generasi jurist yang lebih kritis dan progresif dalam menegakkan keadilan terhadap entitas korporasi.

Batam, 07 Januari 2026

Dr. Iskandar Itan, S.E., M.M.

KATA PENGANTAR

Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Dalam era globalisasi dan liberalisasi ekonomi, kejahatan korporasi telah berkembang menjadi ancaman laten yang tak kasatmata, namun sangat merusak. Buku ini hadir untuk membedah kompleksitas tindak pidana korporasi melalui pendekatan hukum pidana yang sistematis dan komprehensif. Dengan menguraikan dimensi normatif, historis, dan praktis dari pertanggungjawaban pidana korporasi, buku ini memberikan fondasi teoretis yang kokoh sekaligus analisis empiris yang tajam. Penulis menyajikan berbagai aspek mulai dari dasar konseptual hingga pendekatan restoratif, menjadikannya sebagai rujukan penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan.

Keunggulan utama buku ini terletak pada Bab 7, yang mengupas secara mendalam perkembangan global dan instrumen internasional terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Bab ini tidak hanya memetakan sejarah dan posisi korporasi dalam sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law*, tetapi juga menjelaskan bagaimana globalisasi hukum mengubah lanskap pertanggungjawaban pidana di tingkat nasional. Lebih lanjut, pembahasan tentang konvensi internasional seperti *Basel Convention* dan *OECD Anti-Bribery Convention* disajikan secara kritis, menjembatani antara norma global dan konteks hukum nasional Indonesia. Hal ini memberikan nilai tambah yang signifikan karena mampu membuka cakrawala pembaca terhadap pentingnya harmonisasi hukum transnasional dalam menjerat kejahatan korporasi lintas batas.

Melalui pendekatan perbandingan yang cermat, Bab 7 memperkuat argumen sentral buku ini: bahwa sistem hukum pidana nasional tidak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi kompleksitas kejahatan korporasi. Penulis menegaskan urgensi adopsi prinsip-prinsip internasional sebagai respons terhadap kelemahan struktural dan institusional penegakan hu-

kum domestik. Dengan demikian, buku ini bukan hanya menjadi refleksi akademik, tetapi juga seruan untuk pembaruan hukum yang progresif dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Batam, 08 Januari 2026

Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum.

KENCANA

KATA PENGANTAR

Dr. Hari Sutra Disemadi, S.H., M.H.

**Kepala Program Sarjana dan Magister Hukum,
Universitas Internasional Batam**

Korporasi hari ini bukan lagi sekadar entitas ekonomi, korporasi telah menjelma menjadi aktor dominan yang mampu membentuk sistem sosial, memengaruhi kebijakan negara, bahkan, dalam banyak hal, melampaui batas-batas hukum. Buku ini hadir dari kegelisahan akademik dan praktik hukum terhadap kenyataan paradoks: ketika korporasi sebagai pelaku kejahatan nyata, namun jerat hukumnya seolah tak ber-dinding.

Dalam menganalisis problematika ini, buku ini berangkat dari pijakan asas hukum pidana yang paling fundamental, yakni asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan yang mendahuluinya. Asas ini bukan hanya sebagai benteng perlindungan hak individu, tetapi juga sebagai ujian integritas bagi negara hukum: mampukah sistem hukum menyediakan perangkat normatif yang adil, rasional, dan cukup progresif dalam men-jangkau aktor non-individu seperti korporasi?. Buku ini mencoba membedah kompleksitas penegakan hukum pidana terhadap korporasi, dari masalah identifikasi pertanggungjawaban, kelemahan regulasi, hingga upaya pembaruan dan pendekatan restoratif. Saya berharap, buku ini tidak hanya menjadi sumbangan akademik, tetapi juga membuka ruang diskursus kebijakan yang lebih progresif untuk menjinakkan paradoks yang telah lama menjadi teka-teki hukum modern. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Batam, 06 Januari 2026

Dr. Hari Sutra Disemadi, S.H., M.H.

PRAKATA PENULIS

Buku referensi ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dalam memahami kompleksitas pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Dalam hukum, korporasi kerap menjadi aktor utama dalam berbagai tindak pidana yang berdampak luas, namun masih sering luput dari jeratan hukum yang setimpal. Buku referensi dengan judul *Paradoks Penjara Tak Berdinding: Menjerat Korporasi di Antara Legalitas dan Realitas* hadir untuk mengupas persoalan ini dengan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan studi normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, telaah literatur terkini, serta analisis studi kasus yang merefleksikan ketimpangan antara legalitas dan realitas dalam praktik penegakan hukum terhadap korporasi.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan sistem hukum pidana korporasi yang adil dan efektif. Melalui 12 bab yang disusun secara sistematis, pembaca akan dibawa menelusuri konsep dasar, sejarah regulasi, teori pertanggungjawaban, hingga kebijakan penal dan pendekatan *restorative justice* yang relevan dalam konteks nasional dan global. Di era KUHP Nasional, urgensi pemahaman mendalam tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi semakin penting, terutama dalam upaya memperkuat sistem hukum yang menjamin keadilan substantif.

Keunggulan utama buku ini terletak pada kedalaman kajian teoretis yang dikombinasikan dengan data empiris dari berbagai putusan pengadilan dan regulasi sektoral, serta analisis perbandingan dengan praktik hukum internasional. Buku ini tidak hanya menyajikan kerangka konseptual yang kuat, tetapi juga menawarkan solusi praktis bagi penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, termasuk reformasi regulasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang lebih progresif.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya sebagai referensi akademik, tetapi juga sebagai

panduan praktis dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan hukum pidana korporasi yang lebih responsif. Semoga buku ini dapat menjadi bagian dari upaya kolektif dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga adil ke atas. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan inspirasi dalam penyusunan buku ini.

Batam, 03 Januari 2026

Dr. Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum.

Emiliya Febriyani, S.H., M.H.

Antony, S.H., M.H.

KENCANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

• Rektor Universitas Internasional Batam	v
• Dekan Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam	vii
• Kepala Program Sarjana dan Magister Hukum, Universitas Internasional Batam	ix

PRAKATA PENULIS	xi
-----------------	----

DAFTAR ISI	xiii
------------	------

BAB 1 DASAR-DASAR KONSEPTUAL HUKUM PIDANA DAN KORPORASI 1

A. Pemahaman Umum tentang Hukum Pidana dan Korporasi	1
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana	1
2. Tinjauan Umum Korporasi	5
3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korporasi	9
B. Konsep Kejahatan Korporasi	13
1. Definisi dan Bentuk Kejahatan Korporasi	13
2. Perbedaan Kejahatan Korporasi dengan Kejahatan Individu	19
3. Faktor Kejahatan Korporasi (<i>Corporate Crime</i>)	21

BAB 2 DIMENSI KEJAHATAN KORPORASI DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA 25

A. Bentuk dan Karakteristik Tindak Pidana Korporasi	25
1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korporasi	25
2. Analisis Korban dari Tindak Pidana Korporasi	28
3. Ruang Lingkup dan Karakteristik Tindak Pidana Korporasi	30
B. Korporasi sebagai Pelaku dan Pertanggungjawabannya	32
1. Konsep Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	32

2.	Organ dalam Korporasi dan Peranannya dalam Tindak Pidana	35
3.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Teori dan Praktik	38
BAB 3	SEJARAH DAN PERKEMBANGAN REGULASI TINDAK PIDANA KORPORASI	43
A.	Sejarah Awal dan Perkembangan Regulasi Pra-Reformasi	43
1.	Pengaturan dalam KUHP Kolonial/ <i>Wetboek Van Strafrecht</i> (1918)	43
2.	Perkembangan Regulasi Pasca Kemerdekaan Melalui Undang-Undang Sektoral (1980-an)	47
3.	Keterbatasan dan Problematika Pengaturan Sebelum Reformasi	50
B.	Perkembangan Regulasi Tindak Pidana Korporasi di Indonesia Era Reformasi hingga KUHP Nasional 2023	53
1.	Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Korporasi pada 1990-an Hingga 2000-an	53
2.	Upaya Harmonisasi Hukum Tindak Pidana Korporasi Melalui Berbagai UU Khusus	55
3.	Lahirnya KUHP Nasional 2023 dan Implikasinya bagi Pertanggungjawaban Korporasi	59
BAB 4	TEORI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI	63
A.	Teori Klasik Pertanggungjawaban Korporasi	63
1.	<i>Identification Theory</i> (Doktrin <i>Alter Ego/Directing Mind</i>)	63
2.	<i>Strict Liability</i> (Tanggung Jawab Mutlak Tanpa Kesalahan)	65
3.	<i>Vicarious Liability</i> (Tanggung Jawab Pengganti Melalui Perbuatan Pegawai atau Agen)	68
B.	Teori Kontemporer Pertanggungjawaban Korporasi	70
1.	<i>Corporate Culture Theory</i> (Budaya Organisasi sebagai Dasar Tanggung Jawab)	70
2.	Perbedaan dengan Teori Klasik	73
3.	Ruang Lingkup Penerapan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia	75

BAB 5	ASAS HUKUM PIDANA TERKAIT PERTANGGUNG-JAWABAN KORPORASI	79
A.	Asas dalam Hukum Tindak Pidana dan Pertanggung-jawaban Korporasi	79
1.	Asas Legalitas (<i>Nullum Delictum Nulla Poena Sine praevia Lege poenali</i>)	79
2.	Peranan Asas Legalitas dalam Kejahatan Korporasi	83
3.	Batasan dan Perkembangan Asas Legalitas dalam Konteks Modern	87
B.	Penerapan <i>Ultimum Remedium</i> dalam Hukum Pidana Korporasi	89
1.	Asas <i>Ultimum Remedium</i> dalam Hukum Pidana Korporasi	89
2.	Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan Korporasi	97
3.	Tantangan Penerapan Asas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi di Indonesia	100
BAB 6	PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA	105
A.	Pengaturan Tindak Pidana dan Pertanggung-jawaban Korporasi dalam Undang-Undang Umum	105
1.	Ketentuan KUHP Terkait Pertanggung-jawaban Korporasi	105
2.	Posisi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Hukum Nasional	108
3.	Hubungan Kerangka Umum KUHP dengan Tindak Pidana Korporasi	110
B.	Pengaturan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Khusus	112
1.	Kajian Tindak Pidana dan Pertanggung-jawaban Korporasi dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	112
2.	Kajian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU Minerba (Pertambangan Mineral dan Batubara)	116
3.	Kajian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	118
4.	Harmonisasi dan Tumpang Tindih Norma Antar Peraturan	122

BAB 7	INSTRUMEN DAN PERKEMBANGAN DUNIA TERKAIT TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI	125
A.	Sejarah Perkembangan Global Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	125
1.	Perdebatan Awal: Apakah Korporasi Dapat Dipidana?	125
2.	Perkembangan di Negara <i>Common Law</i> (Inggris dan Amerika Serikat)	128
3.	Perkembangan di Negara <i>Civil Law</i> (Eropa Kontinental)	130
4.	Pengaruh Globalisasi Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	133
B.	Instrumen Hukum Internasional yang Relevan	136
1.	Basel Convention on Hazardous Wastes	136
2.	OECD Anti-Bribery Convention	139
3.	Implikasi dan Harmonisasi dengan Hukum Nasional Indonesia	142
BAB 8	KEBIJAKAN PENAL DAN KELEMAHAN REGULASI TINDAK PIDANA KORPORASI NASIONAL	145
A.	Konsep Dasar dan Ruang Lingkup <i>Penal Policy</i> dalam Tindak Pidana Korporasi	145
1.	Definisi dan Ruang Lingkup <i>Penal Policy</i>	145
2.	Fungsi <i>Penal Policy</i> bagi Korporasi	150
3.	Pendekatan Strategis dan Implikasi bagi Hukum Nasional	153
B.	Kelemahan Regulasi Nasional dalam Penegakan Tindak Pidana Korporasi	156
1.	Kelemahan Hukum Substantif dan Hukum Prosedural	156
2.	Tantangan Implementasi <i>Penal Policy</i>	160
3.	Perbandingan Hukum Antarnegara	163
BAB 9	EVALUASI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN STRATEGIS TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA	169
A.	Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korporasi di Indonesia	169
1.	Karakter Putusan Strategis dalam Tindak Pidana Korporasi	169

2.	Peran Hakim dalam Menangani Tindak Pidana Korporasi	173
3.	Contoh Kasus Penanganan Tindak Pidana Korporasi	175
B.	Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Korporasi di Indonesia	179
1.	Pertimbangan Secara Faktor Hukum	179
2.	Pertimbangan Secara Sosial dan Ekonomi	182
3.	Perbandingan Internasional	184
BAB 10	KOMPARASI PUTUSAN DAN EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA KORPORASI	189
A.	Komparasi Putusan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia dengan Negara Lain	189
1.	Analisis Putusan Penegakan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia	189
2.	Analisis Putusan Penegakan Tindak Pidana Korporasi di Negara <i>Common Law</i>	192
3.	Analisis Putusan Penegakan Tindak Pidana Korporasi di Negara <i>Civil Law</i>	194
4.	Perbandingan dan Pelajaran bagi Indonesia	198
B.	Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Korporasi	201
1.	Indikator Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Korporasi	201
2.	Kelemahan Penerapan Sanksi Pidana terhadap Korporasi	204
3.	Studi Kasus Penerapan Sanksi Pidana terhadap Korporasi	206
BAB 11	TAHAPAN DAN PENGEMBANGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORPORASI	211
A.	Tahapan Penanganan Tindak Pidana Korporasi	211
1.	Tahapan Penanganan dan Tanggung Jawab Korporasi	211
2.	Penerapan Sanksi sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korporasi	214
3.	Sanksi, Rehabilitasi, dan Kepatuhan Korporasi	216
B.	Solusi dan Arah Pengembangan ke Depan	219
1.	Reformasi Regulasi dan Penguatan Mekanisme Pengawasan	219

2.	Penerapan Perlindungan <i>Whistleblower</i>	221
3.	Harmonisasi Regulasi dan Standar Internasional	224
BAB 12	PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI	229
A.	Konsep dan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Korporasi	229
1.	Pengertian dan Landasan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	229
2.	Konsep Pemulihan Kerugian dalam <i>Restorative Justice</i> Korporasi	233
3.	Menyeimbangkan Kepentingan Publik dan Budaya Korporasi yang Bertanggung Jawab	236
B.	Implementasi dan Tantangan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Korporasi	239
1.	Implementasi <i>Restorative Justice</i> melalui Mediasi dan Pemantauan Kepatuhan	239
2.	Tantangan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Korporasi	241
3.	Manfaat Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Korporasi	244
	DAFTAR PUSTAKA	247
	PARA PENULIS	315

DAFTAR PUSTAKA

- A.Barlian, Aristo Evandy, dan Annisa D. Permata Herista. "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021): 88–98. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.
- Abadi, Sukma Hidayat Kurnia, dan Ana Rahmatyar. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 1976–84. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5412>.
- Abae, Nadilla Rahmawaty, Rika Nurfadilah, Dinda Maharani, dan Aisya Medina. "Penerapan Teori Hukuman Jeremy Bentham Dalam Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/918>.
- Adam, Syaefullah, Dadang Dadang, Ahmad Zaki, Tubagus Mohammad Adrie Admira, dan Fahri Shaftian. *Good Corporate Governance: Konsep, Teori, Regulasi, dan Praktik*. Diedit oleh Ahmad Isa Anshari. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2025.
- Admojo, Muhammad Yansen Suryo, Hary Kurnia Ramadhandy, Muhammad Afifuddin, Rohmawati Kusumaningtias, dan Ambar Kusumaningsih. "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Menanggapi Tindak Korupsi Study Kasus PT Pertamina." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 970–980. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19232>.
- Adriano, Adriano. "Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017): 158–71. <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.599>.
- Affana, Andi Muhammad Aliffar, dan Andi Rahmah. "Evolusi Hukum Pidana Dalam Konteks Globalisasi: Tinjauan Literatur." *Jurnal Hukum*

- Ius Publicum 5, no. 2 (2024): 121-135. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.163>.
- Afifah Firdaus, dan Indra Yugha Koswara. "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (28 Juni 2024): 1-22. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1>.
- Afifah, Yuni. "Prof. Joost Nan Paparkan Lanskap Regulasi Pidana Ekonomi di Belanda dalam Kuliah Tamu FH UNAIR." *fh.unair.ac.id*, 2022. <https://fh.unair.ac.id/prof-joost-nan-paparkan-lanskap-regulasi-pidana-ekonomi-di-belanda-dalam-kuliah-tamu-fh-unair/>.
- Agustina, Agustina, dan Sagita Purnomo. "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (25 Juli 2023): 1196-1206. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867>.
- Agustina, Bulan Nursheila, Muhammad Habieb Fath Al Faiq, Putri Ariesandra, dan Syifa Azka Salsabila. "Peran Negara dalam Kasus Lumpur Lapindo dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup." *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* 1, no. 1 (2025): 10-18. <https://doi.org/10.59971/li>.
- Ahdiat, Adi. "ICW: Korupsi Paling Besar 2019 Terjadi di Sektor Pertambangan." *kbr.id*, 2020. https://kbr.id/articles/indeks/icw__korupsi_paling_besar_2019_terjadi_di_sektor_pertambangan#google_vignette.
- Ahsinin, Adzkar, Heribertus Jaka Triyana, Ratna Juwita, Rehulina Tarigan, dan Wahyu Wagiman. *Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia*. Diedit oleh Dwi Pengkik. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.
- Aiman, Rahmat, Abdun Nafi Kurniawan, Muhamad Tri Panunggal Aprianto, Arif Budiono, Muslimin Muslimin, Chitra Imelda, dan Unggul Sagena. *Korupsi Dari Berbagai Perspektif*. Malang: Pustaka Peradaban, 2024.
- Ainun, Ainun, Nasrullah Arsyad, dan Imran Eka Saputra. "Analisis Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 17-32. <http://103.133.36.88/index.php/legal/article/view/1471>.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana

- Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 803–23. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3272>.
- Akmal, Ahmad Wildan Rofrofil. “Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Perspektif Masalah Mursalah di Indonesia.” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 2 (15 Mei 2024): 200–222. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i2.21598>.
- Al-Farizy, Zanuwardani. “Reformasi Hukum Terhadap Pidana Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Bevinding* 2, no. 3 (2025): 39–52. <https://doi.org/journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1266>.
- Alaydrus, Hussein. “Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Korporasi di Indonesia.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 8036–8050. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2472>.
- Alexandra, Sallie, dan Rosdiana Rosdiana. “Reformasi Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional: Studi Perbandingan Indonesia dan Uni Eropa.” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 1 (14 Maret 2025): 807–23. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2344>.
- Alfarauq, Dimas Yemahura, Siti Marwiyah, dan Wahyu Prawesthi. “Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim.” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (12 Februari 2025): 01–21. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.660>.
- Alfaruqi, Haidar Ammar, Dewi Kania Sugiharti, dan Amelia Cahyadini. “Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan.” *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 113–33. <https://doi.org/10.24198/acta.v3i1.371>.
- Alfianda, Rudy, Merta Risardi, Kamisan Kamisan, Muslihun Amin, Sarioda Sarioda, Rahmi Maulida, dan Amalia Zahra Albayani. “Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi.” *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 64–75. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.23>.
- Alhakim, Abdurrahman, dan Eko Sopyono. “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019):

- 322–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.
- Ali, Mahrus. “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 1, no. 25 (2018): 137–58. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>.
- Ali, Mahrus, dan Irwan Hafid. “Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (13 April 2022): 1–15. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>.
- Aliba, Tiara Putri, Fristia Berdian Tamza, Eko Raharjo, Firganefi Firganefi, dan Mamanda Syahputra Ginting. “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemalsuan BBM: Analisis Kritis terhadap Pemenuhan Tujuan Pemidanaan Studi Putusan No. 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 5548–5559. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2152>.
- Alifia, Rizkia Amira, Christian Wiradendi Wolor, dan Eka Dewi Utari. “Evaluasi Keefektifan Sistem Whistleblowing Pada PT JKL.” *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 2, no. 4 (2025): 136–44. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i4.5350>.
- Alisa, Alisa, Nafla Erina Salim, Sania Fadhila Ramayani, dan Ambar Kusumaningsih. “Peran Etika Bisnis dalam Menjembatani Kepentingan Konsumen dan Shareholder: Studi Kasus pada Proyek Meikarta.” *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 3915–3922. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.625>.
- Amalia, Mia, Syahrul Gani, Sigid Triyono, H. Hartawan, dan Abdul Rahman Upara. *Hukum Pidana (Asas-Asas, Teori, dan Kasus)*. Diedit oleh Efitra Efitra. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Amanda, Amanda. “Strategi Public Relations Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan.” *ADVis: Journal of Advertising* 1, no. 1 (2020): 125–35. <https://jurnal.umat.ac.id/index.php/advis/article/view/4000/2221>.
- Amdani, Yusi. “Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 186–98. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/132>.
- Amin, Muhammad Habibul, Dedy Supriyadi, dan Fauziah Lubis. “Praktik Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Sosiologi Korupsi.” *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 1453–61. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.279>.

- Amrani, Hanafi. "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana." *Jurnal Negara Hukum* 6, no. 2 (2015): 187–204. <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i2.254>.
- Amril, Amril, Asriyana Asriyana, dan Muh. Fuad Randy. "Peran Manajer Dalam Pengelolaan Risiko Ekonomi di Perusahaan Multinasional." *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 2 (5 Desember 2024): 454–62. <https://doi.org/10.46576/bn.v7i2.5332>.
- Amrulah, Arif. *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Di Bidang Perbankan*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Amrullah, Gilang Izzuddin. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan." *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1275–86. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14491>.
- Amrullah, M. Arief. *Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*. Diedit oleh Irfan Fahmi. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ananingdyah, Riri. "Konstruksi Kesepakatan Restorative Justice Terhadap Kejahatan Korporasi Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional." *Journal of Community Service* 5, no. 1 (2023): 132–44. <https://doi.org/10.56670/jcs.v5i1.118>.
- Ancel, Mark. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. Diedit oleh Leon Radzinowicz. London: Routledge & Kegan Paul, 1965.
- Andari, Aulia Puspa, Priscilla Regina Pramesti Wibawa, dan Sumriyah Sumriyah. "Kedudukan Hukum RUPS Pada Perusahaan Holding Company di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 72–89. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1599>.
- Anggita, Nehru, dan Fendy Eko Wahyudi. "Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel." *Journal of International Relations Diponegoro* 4, no. 3 (2018): 332–40. <https://doi.org/10.14710/jirud.v4i3.21041>.
- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum Industrialisasi di Indonesia Dalam Tinjauan Historis." *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 2 (2019): 167–82. <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.8734>.
- Angraeni, Novita, Dewi Bunga, Citranu Citranu, dan Ardiyanti Aris. *Hukum Pidana (Teori Komprehensif)*. Diedit oleh Sepriano Sepriano. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Anindito, Lakso. "Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Ke-

- salahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (6 Maret 2017): 1–29. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.138>.
- Anjari, Warih. “Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana.” *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2017): 116–21. <https://www.neliti.com/journals/jurnal-widya-yustisia>.
- Antony, Antony, dan Ampuan Situmeang. “Dari Kolonial Ke Konstitusional: Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia dengan KUHP Nasional.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (2025): 141–148. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1559>.
- Anwar, Syaiful, dan Johan Edi Nepr. “Harmonisasi Hukum Digital: Tantangan Global dan Strategi Adaptif Indonesia dalam Era Kedaulatan Siber.” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2025): 69–88. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1297>.
- Aprita, Serlika. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*. Diedit oleh Prasistiwi A. Jember: CV Pustaka Abadi, 2019.
- Apriyanti, Apriyanti, Dahlan Ali, dan Suhaimi Suhaimi. “Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pidana Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho).” *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 1, no. 2 (2014): 78–84. <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4652/4020>.
- Ar, Aris Munandar, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, dan Danang Fajri. “Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (27 Oktober 2024): 240–52. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>.
- Arafat, Muhammad. “Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *JIH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.
- Arbain, Arbain, dan Arif Adiputro. *Green Legislation Dalam Prolegnas 2020–2024*. Jakarta: Pusat Kajian Parlemen Indonesia (Indonesian Parliamentary Center), 2024.
- Ardalepa, Panji Rampu. “Peran Hukum dalam Mengatur Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Hasil Tambang di Kawasan Kon-

- servasi.” *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024): 893–906. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2368>.
- Aridarmo, Subagio. “Asuransi Lingkungan Berdasarkan Polluter Pay Principle dan Command and Control Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kebarakan Hutan.” *Jurnal Dharmasiswa* 2, no. 2 (2022): 553–68. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/2>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- . *Sari Kuliah: Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006. <https://doi.org/979-421-884-7>.
- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Al-Adl* 10, no. 2 (2018): 173–90. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.
- Arifin, Muhamad Zainul. *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. Diedit oleh Tim Kreatif Publica Institute. DKI Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024.
- Arifin, Muhammad Zainul. *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. Diedit oleh Tim Kreatif Publica Institute. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024.
- Aripah, Iip. “Penerapan Asas Kepatutan dan Keadilan dalam Putusan Yurisprudensi Perdata.” *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (29 Juni 2023): 70–77. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1671>.
- Aripkah, Nur. “Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 367–387. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>.
- Aritonang, Dinoroy Marganda. “Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 45–58. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.729>.
- Ariyanti, Vivi. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (30 Desember 2019): 33–54. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.
- Arrofii, Dinda Yusuf Tsary, dan Sulthan Azis Muhammad. “Implementasi Prinsip Good Corporate Governancedalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di BUMN.” *Padjadjaran Law Review* 13, no. 1 (2025): 47–59.

- <https://doi.org/10.56895/plr.v13i1.2210>.
- Arum, Siti Khumairoh Kusuma, dan Khilmatin Maulidah. "Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia." *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 1 (2025): 57–69. <https://doi.org/10.56607/jhe>.
- Aryani, Lanatasya, dan Maria R.U.D. Tambunan. "Catatan Atas Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia." *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 4, no. 2 (2022): 362–81. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i2.14893>.
- Ashsyarofi, Hisbul Luthfi. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Yurispruden* 4, no. 1 (2021): 29–43. <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9164>.
- Askin, H. Moh., dan Masidin Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Diedit oleh Aep Purnama. Jakarta: Kencana, 2023.
- Astuti, Mirsa, dan Muhammad Faris Aksa. "Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi." *Juris Studia: Jurnal Kajian hukum* 2, no. 3 (2021): 679–84. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.195>.
- Asyujuti, Mohammad Fahmi, Fitria Hariani Pertiwi, Siti Lismaya Adawiyah, Erika Mulyanti, Yunia Mustika, dan Aeni Latifah. "Pendekatan Integratif dalam Pencegahan Korupsi: Studi Kasus dan Solusi Berbasis Transparansi dan Partisipasi Publik." *Jurnal Penelitian Inovatif* 5, no. 1 (29 Maret 2025): 791–802. <https://doi.org/10.54082/jupin.1229>.
- Atmasasmita, Romli, dan Kodrat Wibowo. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Diedit oleh Irfan Fahmi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Aulia, Keysha Nashwa, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, dan Noerma Kurnia Fajarwati. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 713–24. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>.
- Awaluddin, Syah. "Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2024): 24–42. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>.
- Awaluddin, Syah, Indri Sukiman, Muh. Sanusi Rumbara, dan Abdul Rasid Waliulu. "Kriminologi Kejahatan Bisnis dan Pertanggungjawaban

- Perseroan Terbatas dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022): 230–249. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.4893>.
- Azyral, Yusuf. “Peran Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Korporasi Menurut Perma No. 13 Tahun 2016.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/719/477>.
- Bagenda, Christina, Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Muhammad Rifqi Hidayat, Yudi Prihartanto Soleh, Rachmadi Usman, Amri Amri, et al. *Hukum Perdata*. Diedit oleh Ridwan Ridwan. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Bahar, Anisa, Azharotul Ulumiyah, dan Tasya Malikal Balqis. “Keberhasilan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Studi Kasus Porsema Universitas Sebelas Maret.” *Jurnal Mahasiswa* 7, no. 2 (2025): 46–55. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v7i2.1082>.
- Bahri, Syamsul. “Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat.” *Ameena Journal* 2, no. 4 (30 November 2024): 425–36. <https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.135>.
- Bakhri, Syaiful. “Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Denda dan Penerapannya Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 317–34. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art8>.
- Barama, Michael. *Tindak Pidana Khusus*. Diedit oleh Art Division Unsrat Press. Manado: Unsrat Press, 2015.
- Basalama, Frizky Ahmad. “Eksistensi Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 52–57. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16669/16186>.
- Basri, Tengku Hasan, Lukertina Lukertina, Supardi Supardi, dan Audita Audita. “Pengaruh Budaya Perusahaan, Dewan Direksi, dan Kinerja Karyawan terhadap Good Corporate Governancedengan Audit Internal Sebagai Variabel Interveningpada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI.” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2022): 2189–99. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.847>.
- Bawole, Grace Yurico. “Penerapan Sistem Sistem Hukum Pidana Civil

- Law dan Common Law Terhadap Penanggulangan Kejahatan Korporasi." *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014): 75–82. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/5301>.
- Billa, Aulya Salsa, Muhammad Alvian Rhamadani, dan Evan Nurrahman. "Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 15, no. 11 (2025): 681–90. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Bohlander, Michael. *Principles of German Criminal Law*. North America: Hart Publishing, 2009.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Brouwer, Darryl Evan. "Corporate Culture Model Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Korporasi: Justifikasi Teoretis Pemidanaan Korporasi Dalam KUHP." *Tanjungpura Law Journal* 9, no. 1 (2025): 33–59. <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i1.76606>.
- Budiyanto, Sigit. *Kolaborasi: Strategi Mengurangi Risiko Pengulangan Kejahatan Terorisme*. Diedit oleh Adhi Ardian Kustiadi. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2025.
- Bulan, Dewi Nawang, dan Nandang Sambas. "Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam RUU KUHP: Analisis Normatif dan Kesiapan Praktis Aparat Penegak Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 25–30. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1654>.
- Burhanuddin, ST. "Seminar Nasional Sambut Hari Lahir Kejaksaan, Jaksa Agung Dorong Pemulihan Aset Melalui Kesepakatan Penundaan Penuntutan." *Kejaksaan.go.id*, 2025. <https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/news/7384/read>.
- Burrohim, Habi, I Gede Widhiana Suarda, dan Ainul Azizah. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi." *Jurnal Rechtsens* 11, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i1.1137>.
- Butar, Franky Butar, dan Ika Syafitri. *Penegakan Hukum Lingkungan (Administratif, Keberdataan dan Kepidanaan)*. Diedit oleh Ovarine Imtihana. Surabaya: Airlangga University Press, 2025.
- Butarbutar, Lamhot Erik, Rr. Dijan Widiowati, dan Agung Makbul. "Peran Teori Identifikasi Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 7 (2022): 1677–92. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p18>.

- Butarbutar, Russel. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 9, no. 1 (2015): 51-66. <https://doi.org/10.31479/jphl.v9i1.31>.
- Cahyani, Ivanna Eltiara, Arief Amrullah, dan Dina Tsalits Wildana. "Sanksi Publisitas Dalam Bentuk Pidana Pengumuman Putusan Pengadilan Terhadap Korporasi Pelaku Perdagangan Orang." *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (13 Juni 2024): 51-66. <https://doi.org/10.25077/delicti.v2.i1.p.51-66.2024>.
- Cahyono, Cahyono. "Efektivitas Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Menanggulangi Kasus Perusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan UUPPLH Oleh: Cahyono." pn-sleman.go.id, 2024. <https://pn-sleman.go.id/2024/04/17/efektivitas-bentuk-pertanggungjawaban-pidana-bagi-korporasi-dalam-menanggulangi-kasus-perusakan-dan-atau-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uupplh/>.
- Candra, Septa. *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif*. Diedit oleh Irfan Fahmi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Chamdani, Chamdani, Wawan Setiabudi, dan Vika Andarini. "Pertanggungjawaban Hukum Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Terhadap Pekerja di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 1 (2022): 87-107. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i1.68>.
- Chan, Muhammad Rafly, Ragil Surya Prakasa, Muhammad Ibrahim Musa, Harits Surya Pratama, Muhammad Hafisz Al-Qalil, dan Dwi Ari Suwanda. "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi." *Jurnal Puan Indonesia* 5, no. 2 (2024): 693-700. <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.306>.
- Chandra, Muhammad Alvian Yudistira, Chaerudin Chaerudin, Ali Maskur, dan Arina Hukmu Adila. "Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (30 April 2025): 509-29. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11770>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 435-57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>.
- Chiputra, Dhimas Wahyu, dan Arief Rachman Hakim. "Ius Constituentum: Perspektif Hukum Dalam Regulasi Ganti Rugi Pada Kasus Ben-

- cana Lapindo Brantas Sidoarjo.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 20 (2024): 197–208. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14274536>.
- Clinard, Marshall B., dan Peter C. Yeager. *Corporate Crime*. London: Collier MacMillan Publishers, 1980.
- Cong, Leony, dan Zainudin Hasan. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Fraud di Perusahaan.” *Journal of Management and Creative Business* 3, no. 1 (16 Desember 2024): 161–70. <https://doi.org/10.30640/jmc-bus.v3i1.3558>.
- Crippa, Lorenzo. “Do corporate regulations deter or stimulate investment? The effect of the OECD anti-bribery convention on FDI.” *The Review of International Organizations* 20, no. 3 (20 September 2025): 415–41. <https://doi.org/10.1007/s11558-023-09519-y>.
- Daeng, Yusuf, Samson H. Sitorus, Awi Ruben, Dwi Frananta Tarigan, dan Surya Prakasa. “Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 12981–12989. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14629>.
- Damayanthi, Vivin Retno. “Proses Industrialisasi di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Politik.” *JIAE: Journal of Indonesia Applied Economics* 2, no. 1 (2008): 68–89. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2008.002.01.3>.
- Darjoko, Felix Joni, dan Ertambang Nahartyo. “Efek Tiper Kecurangan dan Anonimitas Terhadap Keputusan Investigasi Auditor Internal Atas Tuduhan Whistleblowing.” *JAKI: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 2, no. 14 (2017): 202–7. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.11>.
- Darmawan, Wasistha Budiarta. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 1405K/PID.SUS/2013).” *Jurnal Recidive* 4, no. 2 (2015): 192–200. <https://doi.org/10.20961/recidive.v4i2.40635>.
- Dayanara, Trisha. “Penyampaian Informasi Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.” *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 1 (2022): 203–14. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1180&context=dharmasiswa>.
- Denniagi, Erma. “Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 246–64. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.11>.

- org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3.
- Deswat, Yoga, Ani Purwati, dan Cakra Heru Santosa. "Peran Interpol Dalam Penegakan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Korporasi Global." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 8 (2025): 311–20. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i8.807>.
- Devara, Evan, Maret Priyanta, dan Yulinda Adharani. "Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 101–16. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641>.
- Devra, Desi Devrika. "Penyelesaian Konflik Dalam Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Adab dan Norma Dalam Pancasila." *Jurnal Pengabdian Kompetitif* 3, no. 2 (9 Februari 2025): 89–93. <https://doi.org/10.35446/pengabdiankompetitif.v3i2.2039>.
- Dewa, Renada Cipta, dan Tanudjaja Tanudjaja. "Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (29 Juni 2024): 96–106. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.1005>.
- Dewi, D K. "Kecenderungan Aparat Penegak Hukum Pada Delik Formil Hukum Pidana Lingkungan Terkait Dengan Asas Ultimum Remedium." *Jurnal Darma Agung* 33, no. 2 (2025): 309–18. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v33i2.5717>.
- Diantha, I Made Pasek, dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya. *Analisis Kejahatan Transnasional Dalam Berbagai Instrumen Hukum Internasional*. Diedit oleh Irfan Fahmi. Jakarta: Kencana, 2023.
- Dimlana, Rizky Satria, Muhamad Fadly Darmawan, dan Asmak Ul Hosnah. "Evaluasi Kinerja Penyidik Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Korporasi di Era Globalisasi." *YUSTISI* 11, no. 3 (1 Oktober 2024): 98–104. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17877>.
- Dion, Michael. "Ethical leadership and crime prevention in the organizational setting." *Journal of Financial Crime* 15, no. 3 (2008): 308–19. <https://doi.org/10.1108/13590790810882892>.
- Disemadi, Hari Sutra, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 118–27. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.38>.
- "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum

- Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 118–27. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>.
- Disurya, Ramanata, Suryati Suryati, Layang Sardana, Yanuar Syam Putra, Haidir Fitra, dan Munirah Munirah. “Integrasi Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam Praktik Hukum Bisnis Indonesia.” *Wajah Hukum* 9, no. 1 (2025): 58–66. <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1710>.
- Dita, Sekar Ayu, dan Atik Winanti. “Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 526–42. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037>.
- DM, Mohd. Yusuf, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, dan Selvin Delpian Giawa. “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>.
- Dwinanda, Irfan Alfieansyah. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Ekspedisi Yang Melakukan Pengiriman Narkotika Dihubungkan Dengan Identification Theory.” *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, no. 2 (2022): 137–52. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/triwangsa/article/view/5718/2416>.
- Dwiyantama, Rayhan Wardhana Hascarya. “Studi Perbandingan Hukum Perwujudan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara Inggris dan Indonesia.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 1 (20 April 2023): 1–7. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i1.12359>.
- Dwiyanti, Ni Kadek Ayu Lisa, dan Luh Putu Mahyuni. “Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Perhotelan: Studi Kasus Pada The Tanjung Benoa Beach Resort.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis* 3, no. 2 (2018): 153–60. <https://doi.org/10.38043/jiab.v3i2.2119>.
- Efendy, Noor, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. “Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (15 Desember 2023): 656–78. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.195>.
- Effendi, Shofi Munawwir, I Gede Widhiana Suarda, dan Fiska Maulidian Nugroho. “Formulasi Pidana Penutupan Korporasi Atas Delik Lingkungan Hidup.” *Veritas et Justitia* 9, no. 1 (2023): 138–63. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6123>.

- Ekadjahjana, Widodo, Yunan Hilmy, Tongam Renikson Silaban, Audy Murf, Djoko Pudjirahardjo, Kartiko Nurintias, Yasmon M. L. S, et al. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2021*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2021.
- Elda, Edita. "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2019): 1–18. <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.477>.
- Erdianti, Ratri Novita. *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*. Diedit oleh Septian R. Malang: UMM Press, 2019.
- Erlangga, Afga Samudera, Afga Samudera Erlangga, dan Kevin Hartono. "Perbandingan Sistem Hukum Civil law dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi." *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium* 1 (2024): 318–23. <https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/view/31/31>.
- Eryarifa, Saskia. "Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Triwangsa Hukum* 1, no. 2 (2022): 103–22. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/triwangsa/article/view/5757/2414>.
- Fadhila, Kharisma Wulan. "Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023." *Action Research Literate* 8, no. 3 (2024): 649–57. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i3.277>.
- Fadjar, Adfiyanti, dan Armansyah Armansyah. "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Isu Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Guna Terwujudnya Keberlanjutan Perusahaan." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (28 Juni 2025): 1–11. <https://doi.org/10.52005/rechten.v7i1.179>.
- Fadli, Zul, Ady Purwoto, Mahlil Adriaman, Andi Annisa Nurlia Mamonto, Dudi Mulyadi, Rahma Fitri, Citranu Citranu, et al. *Hukum Perusahaan*. Diedit oleh Neila Sulung. Padang: GET PRESS INDONESIA, 2022.
- Faradila, Firda, dan Nur Kholim. "Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia." *Action Research Literate* 8, no. 11 (2024): 3174–84. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i11.2349>.
- Farina, Thea, Ivans Januardy, Efransen Yosafat Nababan, Alex Alex, Angi Kristiana, dan Aprilianita Aprilianita. *Tindak Pidana Korporasi*. Diedit oleh Ajrina Putri Hawari. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025.

- Fatichah, Sammah, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Ekosida di Indonesia*. Diedit oleh Nur Khasanah. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Fatimah, Fines, dan Barda Nawawi Arief. "Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia." *Law Reform* 7, no. 2 (2012): 1–42. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>.
- Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, dan Opik Rozikin. "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (2025): 46–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>.
- Faturachman, Fauzan Azima, Tomi J.E Hutasoit, dan Asmak Ul Hosnah. "Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 2 (1 Mei 2024): 197–212. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>.
- Fauzi, Ervan. "Walhi Tuduh Freeport Lakukan Dua Pelanggaran." *Tempo*.co, 2003. <https://www.tempo.co/arsip/walhi-tuduh-freeport-lakukan-dua-pelanggaran-2023800>.
- Fauzia, Ana, dan Fathul Hamdani. "Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (31 Juli 2022): 497–519. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249>.
- Fazri, Muhammad Safar. "Efektivitas Ancaman Pidana Dalam Penegakan Kepatuhan Pajak." *Restitusi : Jurnal Riset Perpajakan* 2, no. 01 (11 Februari 2023): 51–63. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v2i01.972>.
- Febryani, Evy, Dian Puspa Iwari, dan Serlika Aprita. "Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Dampak Penuntutan Terhadap Korporasi Akibat Pailit." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v7i1.1173>.
- Ferdian, Ardi. "Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Arena Hukum* 14, no. 3 (31 Desember 2021): 523–45. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.6>.
- Firdaus, Sunny Ummul, dan Putri Anjelina Nataly Panjaitan. "Reformulasi

- Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (31 Desember 2024): 355–82. <https://doi.org/10.55292/2thnr771>.
- Firmansyah, Alfajri. “Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan KUHAP.” *Jurnal Hukum Jurisdictie* 2, no. 1 (2020): 54–80. <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19>.
- Firmanto, Danang. “Ini Alasan Korporasi Sering Lolos dari Jerat Pidana Korupsi.” *Tempo.co*, 2016.
- Fitri, Fikriya Aniq, Nisaul Muftia, Irda Trilia, Abdurrahman Hidayah Munthe, dan Ramlan Ramlan. “Tinjauan Teoretis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 202–9. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>.
- Fitri, Sheila Maulida. “Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–27. <https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2688>.
- Fitriadi, Ryan Akbar. “Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup: Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup.” *Syntax Idea* 3, no. 7 (2021): 1716–34. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i7.1374>.
- Fizi, Afhani, dan Monica Rahardian Ary Helmina. “Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan.” *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2023): 379–87. <https://doi.org/10.71456/sur.v1i2.603>.
- Flora, Henny Said. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (25 Oktober 2018): 142–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.
- Fradinata, Christian Bellarminus, dan Hery Firmansyah. “Efektifitas Penyelesaian Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.699>.
- Fuad, Muhammad Busyrol. “Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM).” *Jurnal Hukum*

- Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (13 Januari 2020): 97–125. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.90>.
- Galandjindjinay, Johanes Wahyu, dan I Dewa Gde Dana Sugama. “Analisis Dampak Perubahan Dasar Pungutan Pajak Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 1 (2025): 61–71. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.74>.
- Gaman, Nonce Kristin, dan Hadi Tuasikal. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dengan Pendekatan Alternative Dispute Resolution Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.” *Abdurrauf Law and Sharia* 2, no. 1 (1 Mei 2025): 59–87. <https://doi.org/10.70742/arlash.v2i1.195>.
- Gea, Alex Sokhian, dan Yasmirah Mandasari Saragih. “Peran Perusahaan Hukum Terhadap Penerapan Pidana Kepada Korporasi Berdasarkan KUHP dan Peraturan Khusus.” *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 1 (2025): 132–40. <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1793>.
- Ginting, Yuni Priskila. “Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium.” *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024): 73–94. <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.32>.
- Giovannelli, Aurelio, dan Roberto Cursano. “Corporate Liability in Italy.” *Global Compliance News*, 2025. <https://www.globalcompliance-news.com/white-collar-crime/corporate-liability-in-italy/>.
- Gizella, Balqis Beta Achlam. “Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan untuk Mewujudkan Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP.” *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law* 7, no. 2 (2025): 21–30. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/16152>.
- Glendoh, Sentot Harman. “Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi.” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 2, no. 1 (2004): 43–56. <https://doi.org/10.9744/jmk.2.1.pp.%2043-56>.
- Guggisberg, Solène. “Finding equitable solutions to the land-based sources of marine plastic pollution: Sovereignty as a double-edged sword.” *Marine Policy* 159 (Januari 2024): 105960. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105960>.
- Gulo, Nimerodi. “Disparitas Dalam Penjatuan Pidana.” *Jurnal Masalah - Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215–27. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.
- Gultom, Pardomuan. “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkin-

- an Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indone.” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 1 (2022): 154–78. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4065348>.
- Gunawan, Robertus M. Bambang. *GRC (good governance, risk management, and compliance) : konsep dan penerapannya*. Jakarta: RajaWali Pers, 2016.
- Gustiniati, Diah, dan Budi Rizki. *Hukum Pidana di Indonesia*. Diedit oleh PusakaMedia Design. Lampung: Puska Media, 2018.
- H., Rufinus. “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.” Universitas Internasional Batam, 2025. <https://www.uib.ac.id/pertanggungjawaban-pidana-korporasi-di-indonesia/>.
- Hafrida, Hafrida, dan Usman Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Diedit oleh Ali Hasan Zein. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2024.
- Hakim, Dani Amran, Agus Hermanto, dan Arif Fikri. “Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 245–266. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.527>.
- Hakim, Lukman, Rea Kanaya Nurgupita, dan Muhammad Rizaldi. “Integrasi Etika Bisnis: Sebuah Perspektif Baru Dalam Keberlanjutan Perusahaan dan Sosial Kemasyarakatan.” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 15, no. 04 (31 Desember 2024): 836–50. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i04.78323>.
- Hamidi, Dudung, dan Elfrida Ratnawati Gultom. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada KJPP Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2207–21. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.478>.
- Hamsir, Hamsir. *Hukum Pidana Khusus*. Diedit oleh Ali Muhajir. Medan: SEFA BUMI PERSADA, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Diedit oleh Tarmizi Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hanik, Hanik, dan Nurul Wahidah. “Fungsi Hukum Pidana.” *Justitia: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 1 (2025): 8–15.

- <https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia/article/view/147/208>.
- Hapsari, Sita Dewi. "Kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum restorative justice pada ketentuan perpajakan." *Scientax* 6, no. 1 (31 Oktober 2024): 52–66. <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>.
- Harahap, Doly Febrian Rizki, Wilsa Wilsa, dan Andi Rachmad. "Perluasan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 1 (2024): 116–33. <https://doi.org/10.33059/majim.v6i1.10899>.
- Hardinanto, Aris. "Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi." *Jurnal Yuridika* 31, no. 2 (2016): 220–40. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4782>.
- Harefa, Safaruddin, dan Muhammad Alvin Nashir. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2025): 36–60. <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.4966>.
- Harini, Mediana, dan Diding Rahmat. "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 207–30. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Redefinisi Pidana dan Pemidanaan Korporasi Dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 4 (2019): 408–18. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i4.598>.
- _____. "Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi." *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 2 (2007): 323–41. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.2.408>.
- Harnovinsah, Harnovinsah, Lawe Anasta, Camallyta Christine, Putri Surya Permatasari, Syafrani Aulia, Aulia Ristyanti, Fandy Arman Nulhakim, et al. *Audit Internal: Teori, Konsep, dan Praktik*. Diedit oleh Anita Nur Hanifah, Yuli Setyaningsih, dan Gofur Sartika Pantang Gelora. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2024.
- Hartanto, Hartanto. "Moral Dalam Bisnis Korporasi yang Berakibat Tindak Pidana." *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah* 20, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.33477/thk.v20i1.6975>.
- Harun, M, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan RB Sularto. "Criminal Accountability of Political Parties in Achieving Fair Election in Indonesia."

- EAI: *Innovating Research*, 2019, 1–8. <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289459>.
- Hasan, Adil Al. “Kerugian Negara jadi Rp300 Triliun di Dugaan Korupsi PT Timah, Berikut Rinciannya.” *Tempo.co*, 2024. <https://www.tempo.co/hukum/kerugian-negara-jadi-rp300-triliun-di-dugaan-korupsi-pt-timah-berikut-rinciannya-54231>.
- Hasan, Nugroho. “Mengelola konflik dalam implementasi corporate social responsibility dan dampaknya terhadap lingkungan.” *Environmental Conflict* 1, no. 2 (2024): 97–106. <https://doi.org/10.61511/environc.v1i2.2024.1203>.
- Hasanah, Uswatun, Mulia A Sura, dan Riswan Rambe. “Peran Etika Bisnis dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.” *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 3, no. 3 (2025): 365–374. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v3i3.1982>.
- Hasanudin, Hasanudin. “Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana.” *PN-Tilamuta.go.id*, 2016. <https://doi.org/https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggung-jawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/>.
- Hasnda, Nuchraha Alhuda, dan Nuchraha Alhuda. “Eksistensi Perundang-undangan Anti Korupsi Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi Multinasional: Analisis Teori Pilihan Rasional.” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 15, no. 2 (27 Maret 2025): 236–64. <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4586>.
- Hasyir, Dede Abdul. “Perencanaan CSR Pada Perusahaan Pertambangan: Kebutuhan Untuk Terlaksananya Tanggungjawab Sosial Yang Terintegrasi Dan Komprehensif.” *Jurnal Akuntansi Maranatha* 8, no. 1 (2016): 105–18. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam>.
- Hayati, Farkhatul, dan Imahda Khoiri Furqon. “Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 (24 Januari 2025): 130–34. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.406>.
- Hehanussa, Deassy J.A., E.R.M. Toule, John Dirk Pasalbessy, dan Yanti Amelia Lewerissa. *Kemanfaatan Hukum Melalui Mediasi*. Diedit oleh Darmawan Edi Winoto. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2024.
- Hengki, Sriwahyu Ningsi, Fenty U. Puluhulawa, dan Jufryanto Puluhulawa. “Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

- Oleh Korporasi.” *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2023): 89–100. <https://doi.org/10.62951/jbh.v2i1.85>.
- Herlina, Mery. “Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Mahalisan* 1, no. 1 (30 Desember 2024): 46–58. <https://doi.org/10.70837/4n41x506>.
- Herlina, Nina. “Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 2 (2019): 190–203. <https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2917>.
- Herman, H. KMS, dan Subianta Mandala. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Diedit oleh Suwandi Soegianto. Yogyakarta: CV Ananta Vidya, 2024.
- Herman, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, Heryanti Heryanti, dan M. Fadli Masulili. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin.” *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 261–275. <https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.47>.
- Herman, Muhammad Mas Davit, dan RudiYansah RudiYansah. “Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim: Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial.” *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 2 (12 November 2024): 139–63. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.92>.
- Hersyanda, Mochammad Daffa, Irwan Syahputra Lubis, Novrizal Ikhwan, Devina Septriani, dan Mustafa Haqqi. “Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (27 Oktober 2024): 253–65. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.141>.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Diedit oleh Yayat Sri Hayati. Depok: RajaWali Pers, 2024.
- _____. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Hidayah, Farida Nur. “Perkembangan Pengaturan Hukum Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4, no. 02 (28 Februari 2023): 211–25. <https://doi.org/10.36418/jist.v4i02.579>.
- Hidayat, Muhamad Taufik. “Hak Atas Tanah Dalam Lintasan Sejarah Konflik Agraria Antara Korporasi dan Masyarakat (Studi Putusan

- Mahkamah Agung Nomor 650/K/Tun/2022).” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 31, no. 1 (2025): 11240–59. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/26520/20084>.
- Huda, Misbahul. “Legal Politics of Corporate Crime in Indonesia.” *IBLAM LAW REVIEW* 1, no. 2 (2021): 45–62. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.16>.
- Humas Kemenkumham. “Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.” *Menpan.go.id*, 2022. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/resmi-ditandatangani-inilah-lini-masa-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura>.
- Humas MKRI. “MK: Aparat Harus Konsisten Terapkan Pengenaan Uang Pengganti Tipikor.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025. <https://www.mkri.id/berita/mk:-aparat-harus-konsisten-terapkan-pengenaan-uang-pengganti-tipikor-23307>.
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*. Diedit oleh Tarmizi Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Hutapea, Happy Christian. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.” *Journal Equitable* 4, no. 1 (2019): 1–28. <https://doi.org/10.37859/jeq.v4i1.1370>.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Diedit oleh Tarmizi Tarmizi dan Ihsan Ihsan. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Idris, Maulana Fahmi. *Tahapan Peradilan Pidana*. Diedit oleh Agus Wibowo. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.
- Ilham, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan.” *Indonesia Journal of Business Law* 4, no. 1 (26 Januari 2025): 21–39. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>.
- Imi, Ahlul, Zarah Umairah, dan Zulfadli Yusuf. “Peran Strategis Internal Audit dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan: Studi kasus pada Perusahaan Sektor Perbankan.” *International Journal of Accounting, Governance, and Auditing* 1, no. 1 (2025): 22–32. <https://journal.globresco.com/index.php/IJAGA/article/view/50>.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Diedit oleh Andi Maulana Mustamin. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Indriasih, Dewi. *Kompetensi Auditor Internal & Karakter Komite Audit (Terhadap Fraudulent Financial Reporting)*. Diedit oleh Sixteen Sixteen. Bandung: CV Cedekia Press, 2020.
- Institute For Criminal Justice Reform. “Kodifikasi dalam R KUHP dan Implikasi terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia.” icjr.or.id, 2015. <https://icjr.or.id/kodifikasi-dalam-r-kuhp-dan-implikasi-terhadap-tatanan-hukum-pidana-indonesia/>.
- Irawan, Candra, Ria Anggraeni Utami, Helda Rahmasari, Ade Kosasih, Jisi Nasistiawan, Wafiya Wafiya, Rami Putri Redani, dan David Aprizon Putra. *Studi Perbandingan Hukum (Jalan Berliku Harnomisasi Hukum Nasional dan Global)*. Diedit oleh Imam Mahdi. Sijunjung: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2025.
- Irham, M., Alivia Fitri Salsabila, M. Atma Taher, M. Salman Alfariji, dan Rehnaningtyas. “Penerapan Prinsip Legalitas, Yuridiktas, dan Dis-kresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia Guna Mengukuhkan Tata Kelola Yang Berkeadilan.” *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 9, no. 5 (2023): 3683–96. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i5.2387>.
- Irza, Muhammad Yusril, Aniek Periani, dan Ikama Dewi Setia Triana. “Paradigma Modern KUHP Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Swasta dan Korporasi.” *Journal Evidence Of Law* 4, no. 2 (2025): 829–39. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>.
- Iskandar, Dedi, Zulbaidah. W. N, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, dan Zulhazrul Zulhazrul. “Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 293–305. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.147>.
- Ismaidar, Ismaidar, Muhammad Aldin, dan August Saut Maringan Sihombing. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup.” *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2025): 51–58. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.960>.
- Ismaidar, Ismaidar, T. Riza Zarzani, dan Yolla Veronica Sembiring. “Karakteristik Kejahatan Korporasi Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Dimensi*

- Hukum 8, no. 4 (2024): 44–49. <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/177>.
- Ismail, Ismail, Syafrizal Syafrizal, Abdul Azis Manurung, Sofian Sofian, dan Alfiandi Wisudawansyah Nasution. “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pelanggaran HAM Akibat Pencemaran Lingkungan.” *Warta Dharmawangsa* 19, no. 2 (1 Mei 2025): 1149–62. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i2.6956>.
- Ismail, Muhamad Nur, Nicholas Yunix, Jimmy Kurniawan, R Herjuno Wahyu Aji, Andreas Agustinus, Yustinus Taruna, dan Kusjanti Kurniawan. “Peran Hukum dalam Pengaturan Aset Digital Perusahaan: Analisis Perbandingan dan Implikasi bagi Kebijakan Korporat di Era Teknologi.” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 8455–68. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/5249>.
- Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi, dan Fauziah Lubis. “Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 16351–16361. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.15096>.
- Isnawati, Muridah. “Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional.” *Al-Qisth Law Review* 1, no. 2 (2017): 108–18. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/issue/archive>.
- Istirahat, Ihat. “Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia.” *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (28 Juni 2023): 44–51. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>.
- Iswari, Fauzi, dan Azriadi Azriadi. “Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturan Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Sumbang 12 Law Jurnal* 1, no. 1 (2022): 1–22. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/3527/2653>.
- Januarsyah, Mas Putra Zenno. “Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Lingkungan BUMN Persero.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (2017): 24–34. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.125>.
- _____. “Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011).” *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): 257–76. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>.

- Jatmiko, Sugeng. "Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris* 5, no. 2 (2021): 278–85. <https://doi.org/10.56301/juris.v5i2.308>.
- Jauhari, Yoppi Hidayat, dan Ading Rahman Sukmara. "Strategi Peningkatan Kinerja Aparatur Terhadap Pelaksanaan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Ciamis." *Journal of Management and Social Sciences* 3, no. 4 (2024): 112–30. <https://doi.org/10.55606/jimas.v3i4.1722>.
- Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (22 Juli 2024): 1006–17. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.
- Jayadiningrat, Arya, Boris William Octaviano, Nyulistiowati Suryanti, dan Deviana Yuanitasari. "Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Oleh PT Asuransi Jiwasraya." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024): 80–92. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1624>.
- Jebabun, Alfeus, Anugerah Rizki Akbari, Ariehta Eleison Sembiring, Aulia Ali Reza, dan Mompang L Panggabean. "Pemidanaan Korporasi." *leip.or.id*, 2017. <https://leip.or.id/dictum-edisi-12-pemidanaan-korporasi/>.
- Julianda, Adela, Ano Dwi Wijaya, amanda Fathonah Fadhilah, Pipi Susanti, dan M. Yamani. "Dampak Hukum Ketidapatuhan Terhadap Kewajiban Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 90–102. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.224>.
- Jumhur, Muhamad Syahril. "Peran ASEAN Menangani Global Waste Trade di Asia Tenggara Pasca National Sword Policy China Tahun 2019." *Journal of Integrative International Relations* 6, no. 2 (2021): 125–41. <https://doi.org/10.15642/jiir.2024.6.2.125-141>.
- Juniawan, Arbi, Emilia Susanti, dan Erna Dewi. "Urgensi Pembaharuan Asas Legalitas Dalam KUHP Nasional." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025): 110–24. <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.3716>.
- Kabes, Irianto, Vience Ratna Multiwijaya, dan Aprima Suar. "Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Pembayaran Uang Pesangan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja." *Ensiklopedia Social Review* 6, no. 3 (2024): 67–78. <https://doi.org/10.33559/esr.v6i3.2734>.
- Kabir, Syahrul Fauzul. "Kejahatan dan Hukuman: Tantangan Filosofis

- Determinisme-Kausal Terhadap Pertanggungjawaban Pidana.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (5 Juli 2019): 279–98. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2003>.
- Kadarmanta, R.A., Evita Vebrianti Wulandari, dan Muslim Muslim. “Mem-
bangun Budaya Patuh Hukum Dari Perspektif Law Enforcement.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 2, no. 3 (2025): 2006–13. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/2424/2183>.
- Kalensang, Andrio Jackmico. “Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Da-
lam Hukum Pidana dan Penerapannya Dalam Praktek.” *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016): 12–19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13493/13076>.
- Kamal, Galang Mustofa, Wahyu Prawesthi, Siti Marwiyah, dan Mo-
hammad Yustino Aribawa. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
terhadap Pengguna Jasa Debt Collector dalam Melakukan Penagih-
an Pinjaman Online.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 10 (2025):
2366–2387. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4612>.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Karo, Rizky Pratama Putra Karo. “Pidana Uang Pengganti Terhadap Kor-
porasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020):
145–63. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.366>.
- Kartika, Arie. “Implementasi Criminal Policy Terhadap Pertanggung Ja-
waban Kejahatan Korporasi.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no.
2 (2018): 193–209. <https://doi.org/10.31289/jiph.v2i2.1894>.
- Kartika, I Gusti Ayu Putri, dan Sri Wanarsih. *Dinamika Hukum dan
Kebijakan Publik Pertambangan Dalam Konteks Lingkungan Ber-
kelanjutan*. Diedit oleh Bagus Hermanto. Sidoarjo: Uwais Inspirasi
Indonesia, 2024.
- Kautsar, Dhimas Mohammad, dan Dini Rosdini. “Mekanisme Pengenaan
Sanksi Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Mo-
dal Sebagai Implementasi Good Corporate Govenance(Studi Kasus
pada Kantor OJK Pusat).” *Jurnal IAKP : Jurnal Inovasi Akuntansi Keu-
angan & Perpajakan* 6, no. 1 (2025): 55–63. <https://doi.org/10.35314/iakp.v6.i1.466>.
- Kautsar, Izzy Al, dan Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Mo-
dern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial
Masyarakat dari Industrial ke Digital.” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no.
2 (4 Oktober 2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

- Kawihing, Adebrenda Gertji, Hironimus Taroreh, dan Nurhikmah Nac-hrawy. "Fungsionalisasi Hukum Pidana dan Kriminalisasi Perilaku Korporasi Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Konsumen." *Lex Crimen* 13, no. 1 (2025): 1-12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/62784>.
- Kejaksanaan Tinggi Jawa Timur. "Penetapan Tersangka Korporasi Dalam Perkara Komoditas Timah." kejati-jatim.go.id, 2025. <https://kejati-jatim.go.id/penetapan-tersangka-korporasi-dalam-perkara-komoditas-timah/>.
- Kenedi, H. John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Diedit oleh H. Sirajuddin M. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kenedi, John. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan & Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 15-26. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026>.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Diedit oleh Rano Rano dan M. Hasbi Ashshidiki. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Kitri, Innaya Salsabil Indira. "Analisis Implementasi Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia." *Nature : Jurnal Lingkungan dan Kelautan Internasional* 1, no. 1 (9 April 2025): 57-77. <https://doi.org/10.69836/nature-jlki.v1i1.183>.
- Koesoemahatmadja, Etty Etju R. *Hukum Koporasi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Kotimah, Siti Nur. "Yurisprudensi sebagai Alat Kontrol Sosial: Perspektif Hukum Progresif di Indonesia." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 4 (29 Desember 2023): 51-59. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i4.1680>.
- Krismen, Yudi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2014): 133-60. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i1.2089>.
- Kristian, Kristian. *Kebijakan Eksekusi: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*. Diedit oleh Tarmizi Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- . "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi Lembaga Perbankan di Tinjau Dari Teori-Teori Sistem Pertanggungjawaban

- Pidana Korporasi.” *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2020): 114–42. <https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.4550>.
- . *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoretis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*. Diedit oleh Christine Tanuwijaya. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- . “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 4 (26 Desember 2014): 575–621. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.36>.
- Krulinasari, Widya, dan Yudi Yusnandi. “Tinjauan Limbah Kain Sisa Produksi Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional.” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (20 Januari 2022): 57–64. <https://doi.org/10.24967/psn.v2i1.1481>.
- Kurnia, Salsabila Evi. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Policy and Law Journal (Polaw)* 1, no. 1 (2024): 27–37. <https://ejournal.duniakampus.org/index.php/polaw/article/view/48/16>.
- Kurniawan, Dicki Agri, dan Zainal Arifin Hoesein. “Rekonstruksi Pemidaan Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Hidup Sebagai Langkah Strategis Pembaharuan Hukum Nasional.” *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2025): 550–62. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1566>.
- Kurniawan, Kukuh Dwi, dan Dwi Ratna Indri Hapsari. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 324–46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.
- . “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 324–46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.
- Kurniawan, Kurniawan. “Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas.” *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012): 213–25. <https://doi.org/10.22146/jmh.16126>.
- Kurniawan, Ridho, dan Siti Nurul Intan Sari D. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup).” *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 153–168. <https://doi.org/10.35586/v1i2.148>.
- . “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup).” *Jur-*

- nal *Yuridis* 1, no. 2 (2017): 153–168. <https://doi.org/10.35586/v1i2.148>.
- Kusumo, Bambang Ali. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Diedit oleh Nuniek Prasetyowati. Surakarta: UNISRI Press, 2022.
- . “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal Wacana Hukum* 7, no. 2 (2008): 52–65. <https://doi.org/10.33061/wh.v7i2.333>.
- L, Meily Kurniawidjaja. *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*. Jakarta: UI Publishing, 2010.
- Lago, Yuber, Yuni Priskila Ginting, dan Fajar Sugianto. “Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis yang Hidup (Ongeschreven Recht) dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Aspek Filosofis.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 71–84. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7310>.
- Laia, Yohanes Reston N.A, Yasmirah Mandasari Saragih, Sari Sania Tampubolon, Faisal Faisal, dan Andi Gultom. “Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Oleh Korporasi.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 676–85. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5234>.
- Lala, Andi. “Urgensi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang K3 Bagi Tenaga Kerja di Indonesia.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 11 (2018): 1–14. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v3i11.481>.
- Lala, Andi, dan Kosim Kosim. “Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana atas Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi Industri di Indonesia.” *Journal of Society and Development* 5, no. 1 (2025): 37–43. <https://doi.org/10.57032/jsd.v5i1.294>.
- . “Effectiveness of Criminal Sanctions Enforcement against Environmental Pollution by Industrial Corporations in Indonesia.” *Journal of Society and Development* 5, no. 1 (31 Maret 2025): 38–43. <https://doi.org/10.57032/jsd.v5i1.294>.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lazuardi, Iqbal. “Simpati Publik vs Kepastian Hukum, Tantangan Hakim dalam Menegakkan Keadilan.” *MARINews*, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/simpatipublik-vs-kepastianhukum-tantangan-hakim-dalam-05t>.

- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. “Kodifikasi Dalam RKUHP dan Implikasi Terhadap Tatahan Hukum Pidana Indonesia.” *elsam.or.id*, 2015. <https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/kodifikasi-dalam-rkuhp-dan-implikasi-terhadap-tatanan-hukum-pidana-indonesia>.
- Liana, Siska, Carolyn Lukitab, dan Nurul Amalia Ramdan. “Tinjauan OECD Inclusive Framework dalam Meminimalisir Base Erosion Profit Shifting dan Implikasinya terhadap Indonesia.” *Jambura Accounting Review* 6, no. 1 (2025): 12–21. <https://doi.org/0.37905/jar.v6i1.145>.
- Lie, Hendrik, Fadiyah Ramadhani Putri, dan Ingrid Florencia Tanlileasy. “Tindak Pidana Penyusapan oleh Korporasi dari Sudut Pandang Teori Identifikasi.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 202–28. <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.202-228>.
- Limanseto, Haryo. “Serius Lakukan Akses OECD, Indonesia Tunjukkan Komitmen Anti-Bribery Untuk Wujudkan Transparansi dan Fair Economy.” *ekon.go.id*, 2025. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6168/serius-lakukan-aksesi-oecd-indonesia-tunjukkan-komitmen-anti-bribery-untuk-wujudkan-transparansi-dan-fair-economy>.
- Listiyani, Nurul, dan Rakhmat Nopliardy. “Kajian Terhadap UU Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability.” *Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 2 (2022): 42–53. <https://doi.org/10.31602/alsh.v8i2.8274>.
- Lubis, Muhammad Ansori, dan Muhammad Siddiq. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (8 Januari 2021): 35–65. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.818>.
- Lubis, Muhammad Ridwan. *Mengurai Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*. Diedit oleh Bunga Aditi dan Antasya Fitria Rahma. Medan: CV Tungga Esti, 2023.
- Mahesa, Pande Komang Surya, dan Ayu Putu Laksmi Danyathi. “Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Praktis.” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 9 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.62281>.
- Makhron, Fiki Muzaki, Deny Guntara, dan Muhamad Abas. “Penerapan Teori Strict Liability dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dikaitkan dengan Undang-Undang.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora*

- dan Politik 6, no. 1 (2025): 441–454. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6290>.
- Malau, Parningotan. *Corporate Crime: Kecelakaan di Tempat Kerja*. Diedit oleh Emjy Emjy. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2022.
- Malau, Parningotan, Dhenis A. Depari, Sunarto Poniman, dan Danu Setiawan Eko Wardana. “Peran Hukum dalam Mengatur Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 20–30. <https://doi.org/10.62379/ngnc0387>.
- Mangkunegara, RM. Armaya. “Corporate Criminal Liability for Cybersecurity: Rechtsvinding in Adopting the Concept of Corporate Manslaughter in Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (2025): 211–32. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2193>.
- _____. *Hukum Pidana Kehutanan dan Tanggung Jawab Korporasi: Menuju Keberlanjutan dan Keadilan Restoratif*. Diedit oleh Maharani Dewi. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2025.
- Manullang, Herlina. *Reformulasi Alasan Penghapus Pidana Korporasi dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Diedit oleh Khairuddin Tampubolon. Medan: LEMKOMINDO, 2023.
- Manullang, Herlina, dan Riki Yanto Pasaribu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Diedit oleh Yosua Leo Ezra Roito Simamora. Medan: LPPM UHN Press, 2020.
- Mardiansyah, Mardiansyah. *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. Diedit oleh Arthur Ananta. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021.
- Mardiasmo, Mardiasmo. *Governansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Akuntansi Menuju Keberlanjutan Organisasi*. Diedit oleh Fransisca Yulia. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2024.
- Mardiya, Nurul Qur’aini. “Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 483–502. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.483-502>.
- Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup/The Regulation of Corporate Liability In Environmental Criminal Act.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (18 Desember 2018): 483–502. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.483-502>.

- Mardiyati, Siti. "Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi." *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum* 30, no. 3 (2024): 79–90. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v30i3.1171>.
- Maroni, Maroni. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Diedit oleh Team Aura Creative. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2016.
- Marpaung, Berlian. "Penerapan Tindak Pidana Terhadap Korporasi Dihubungkan Dengan KUHP Baru." *Jurnal Nalar Keadilan* 4, no. 1 (2024): 141–63. <https://jurnal.universitaskabupaten.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/91/72>.
- Marpaung, Michelle Evelyn, Patrisia Tanwijaya, Grace Amaze Huberta, Nimrod Welly Belo, Kimberly Fewsan, dan Tri Susanti. "Studi Komparasi dan Implementasi Pemberantasan Korupsi Dalam Praktik Suap dan Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 3 (28 Maret 2025): 709–20. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i3.32052>.
- Maskun, Maskun, Hasbi Assidiq, Siti Nurhaliza Bachril, dan Nurul Habaib Al-Mukarramah. "Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser." *Jurist-Diction* 5, no. 3 (30 Mei 2022): 917–38. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35782>.
- Masputra, M. Hendra Cordova. "Menerobos Civil Law vs. Common Law 101." *MARINews*, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menerobos-civil-law-vs-common-law-101-0Bq>.
- Masyhudi, Fauzul. "Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Korupsi di Indonesia." *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 1 (2023): 1–9. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/500/267>.
- Matogu, Faisal, dan Elis Rusmiati. "Prinsip Due Process of Law dalam Ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 2 (2023): 191–200. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.9695>.
- Maulana, Anas, Rizka Sepriyanti, dan Asep Guntur. "Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 444–53. <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.71>.
- Maulana, Cindy. "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan Panca-*

- sil, Kewarganegaraan, Dan Hukum 2, no. 2 (2025): 19–24. <https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i2.570>.
- Maulana, Yono, Budi Agung Prasetya, dan K. Rahmadi. *Menuju Audit Sektor Publik yang Lebih Transparan: Peran Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik*. Diedit oleh Tiara Azhari. Sleman: Deepublish Digital, 2024.
- Maysarah, Maysarah. *Etika dan Profesi Hukum*. Diedit oleh Khusnul Kha-tima. Kuningan: Goresan Pena, 2025.
- Mearns, Kathryn J. “Safety Leadership and Human and Organisational Factors (HOF)—Where Do We Go from Here?” *SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology*, 2020, 15–23. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25639-5_35_8.
- Miraj, Salsabila Oktaria, Aan Asphianto, dan Ridwan Ridwan. “Perluasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Korporasi dalam KUHP Baru.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 3 (2025): 422–434. <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i3.48229>.
- Misno, Misno. “Mengapa Kesadaran Hukum Penting untuk Pemilik Bisnis dan Manajemen Puncak.” *Yaplegal.id*, 2025. <https://yaplegal.id/blog/mengapa-kesadaran-hukum-penting-untuk-pemilik-bisnis-dan-manajemen-puncak>.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Mokoginta, Anjas Pratama, Tommy F. Sumakul, dan Stefan Obadja Voges. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Lex Crimen* 11, no. 5 (2022): 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42671>.
- Monica, Eka Syafrina, Nirwansyah Sukartara, Sayyida Faradiba Vahlevi, dan Herlina Hanum Harahap. “Hak Konsumen Atas Informasi Produk Dalam Perspektif Hukum Dan Etika Bisnis.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 3786–3801. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20201>.
- Mu’aqaffi, Gaffar, dan Nadia Farabi. “Alasan Ketidakpatuhan Inggris terhadap Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes Tahun 2007–2019.” *Journal of Inter-*

- national Relations Diponegoro* 5, no. 3 (2019): 481–91. <https://doi.org/10.14710/jirud.v5i3.24135>.
- Mudrika, Mudrika. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Legal Opion* 4, no. 6 (2016): 1–15. <https://www.neliti.com/publications/150632/pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentan#cite>.
- Mudrika, Mudrika, Joko Sriwidodo, dan Diah Sulastri Dewi. “Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi Dengan Nominal Kecil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (10 Desember 2023): 5261–72. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1909>.
- Mufty, Abdul Malik, dan Nur Sri Maryam. *Hukum Pidana Internasional*. Diedit oleh Tahta Media. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2025.
- Muhtar, Zainal. “Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian (Omkering van Bewijslast) Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Terdakwa.” *Jurnal Supremasi Hukum* 2, no. 2 (2013): 445–74. <https://doi.org/10.14421/sh.v2i2.1940>.
- Mukaromah, Lisa Aminatul, Eko Arief Cahyono, Dery Ariswanto, dan Khurul Anam. “Implementasi Restorative Justice dalam Pemulihan Ekonomi Nasional: Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis (Studi terhadap Rumah Restorative Justice Bojonegoro).” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6349–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. “Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (10 Juli 2023): 225–47. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Muladi, Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi, Muladi, dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal responsibility)*. Bandung: Alumni, 2013.
- Mulkan, Hasanah. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Diedit oleh Nyimas Amrina Rosyada. Palembang: Noer Fikri Offset, 2022.
- Mulyati, Nani. “Korporasi sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Humas FHUI*, 2025. <https://law.ui.ac.id/korporasi-sebagai-subjek-hukum-dan-pertanggungja>

- wabannya-dalam-hukum-pidana-indonesia/.
- _____. “Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” *Nagari Law Review* 2, no. 2 (2019): 183–94. <https://doi.org/10.25077/nal-rev.v2.i2.p.183-194.2019>.
- _____. “Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Sektor Private di Negara ASEAN.” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (9 Juli 2023): 722–38. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.373>.
- Muqorobin, Mohammad Khairul. “Babak Baru Hukum Pidana Indonesia: Sejarah Perkembangan dan masa depan KUHP di Indonesia.” *MA-RINews*, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN>.
- Musdalifah, Dyajeng Ayu, Ali Masyhar, dan Cahya Wulandari. “Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.” *JISPENDIORA : Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 590–602. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i1.2485>.
- Mutmainnah, Luluk. “Penghapusan Frasa Dengan Sengaja Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.” *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium* 1 (2024): 347–57. <https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/view/35>.
- N, Sindy Riani Putri, Shane Evelina, dan Diah Ayu Ma’rifatul Jannah. “Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1276–96. <https://doi.org/10.56370/jhlhg.v2i12.144>.
- Nahrowi, Nahrowi, dan Muhammad Ali Murtadlo. “Dinamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum di Indonesia.” *Jurnal Legisla* 16, no. 2 (2024): 47–62. <https://doi.org/10.58350/legisia.v16i2.515>.
- Napitupulu, Erasmus A.T., Genoveva Alicia K.S. Maya, Iftitahsari Iftitahsari, dan M. Eka Ari Pramuditya. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. Diedit oleh Zainal Abidin dan Anggara Anggara. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019.
- Narendra, Satwika, Gde Made Swardhana, dan Diah Ratna Sari Hariyanto. “Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Kesalahan Menurut

- Hukum Pidana.” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5290–5303. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5089>.
- Nariswari, Anak Agung Istri Intan Argyanti, dan Putu Tuni Cakabawa Landra. “Peran Notaris dalam Hal Perolehan Pengakuan Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 3 (2020): 601–10. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p14>.
- Natamiharja, Rudi, Ikhsan Setiawan, dan Siti Khoirunisyah. “Kewajiban Negara Dalam Mencegah Pelanggaran Oleh Korporasi Multinasional.” *Tanjungpura Law Journal* 9, no. 2 (2025): 126–54. <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i2.89877>.
- Natasia, Warna Bela, I Ketut Suyoga Arya Saputra, Waldo Christian Marpaung, Haniva Salsabilla, Bintani Putri Nusantara, dan Fajar Ramadhan. “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower: Studi Perbandingan Indonesia–Amerika Serikat.” *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 320–30. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.328>.
- Natsir, Muhammad. *Korporasi Antara Sanksi Dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh*. Diedit oleh Meta Suriyani. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- . “Mediasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan: Solusi Alternatif Untuk Mewujudkan Keadilan Yang Berkelanjutan.” *Jurnal Arbitrase Indonesia* 1, no. 1 (2025): 11–21. <https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/jarbi/article/view/1>.
- Nawawi, Mohammad Syafa Fatkhrohman, dan Dinda Dinanti. “Reformasi Pidana Korporasi Dalam KUHP 2023 dan Relevansinya Bagi Pencegahan Kejahatan Ekonomi di Indonesia: Analisis Terhadap Pasal 45 KUHP.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 1 (2025): 1851–60. <https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/causa/article/view/2125>.
- Negara, Dharma Setiawan, dan Lufsiana Lufsiana. *Hukum dan Pembangunan*. Diedit oleh Abd Wafi. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2025.
- Nelson, Febby Mutiara. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara : Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement?” *Simbur Cahaya* 26, no. 2 (17 Januari 2020): 230–53. <https://doi.org/10.28946/sc.v26i2.459>.

- Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, dan Zain Irawan. “Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya.” *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): 414–23. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79929>.
- Ningrum, Dini Kusuma, dan Dipo Wahyoenno Hariyono. “Sanksi Hukum Sebagai Instrumen Penegakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 6 (2025): 372–384. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2477>.
- _____. “Sanksi Hukum Sebagai Instrumen Penegakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Indonesia.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 6 (2025): 372–384. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2477>.
- Ningrum, Hesti Widya. “Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (2018): 139–156. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1633>.
- Novilia, Vini, dan Hudi Yusuf. “Efektivitas Sanksi Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Perspektif Hukuman Ekonomi Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi.” *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 5364–78. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1453/2395>.
- Novira, Elyana, dan Uning Pratimaratri. “Perubahan Sosial dan Hukum Perbankan di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9293–9306. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kurnadi, dan Abid Abid. “Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru.” *Jurnal Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.
- Nugroho, Mikael Adrian Tri, Tengku Marisha Alda Salsabilla, Tutu Sara Saufika, Tri Novita Sari Manihuruk, dan Mohammad Yusuf DM. “Implikasi ‘Polluter Pays Principle’ dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Terhadap Pencemaran Lingkungan Melalui Air Limbah.” *Reformasi Hukum* 28, no. 1 (2024): 14–23. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.932>.
- Nugroho, Wahyu. *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Diedit oleh Arlisa St. Zahra. Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.
- Nuha, Aprilia Ruhil, Nurul Istianah, dan Sumriyah Sumriyah. “Aspek Hu-

- kum Perseroan Yang Tidak Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Kasus PT Pitala Gunawan Raya)." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 237-249. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.260>.
- Nur, Yudha Hadian, dan Dwi Wahyuniarti Prabowo. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 5, no. 2 (2011): 177-95. <https://jurnal.kemendag.go.id/index.php/bilp/article/view/127>.
- Nurdipa, Ilhan, dan Anita Zulfiani. "Penerapan Doktrin Identifikasi dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2, no. 2 (2025): 104-18. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.779>.
- Nurlaily, Novy Yandari, dan Agus Supriyo. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup." *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (2022): 255-69. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>.
- Nurvita, Sandrina Rahma, Indah Putri Malinda, Louisa Aulia Azzahra, Chornilia Shilvi Putri Januari, dan Aulia Arinda Milawati. "Konflik Pajak dan Implikasinya: Studi Kasus PT Freeport Indonesia di Papua." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 11 (2024): 70-74. <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/483/597>.
- Nurwanti, Yulian Dwi, M. Aziz Zaelani, dan Dina Irawati. "Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara." *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 133-43. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2097>.
- Opsunggu, Eben Patar, dan Zainal Arifin Hoessein. "Analisis Penanganan Korupsi dalam Sistem Civil Law dengan Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda." *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2025): 1110-24. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1802>.
- Ovelia, Lisa, dan Ida Bagus Ketut Bayangkara. "Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi PT Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023." *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 5, no. 3 (2025): 124-38. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2176>.
- Padil, Padil. "Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2016): 44-59. <https://doi.org/10.12345/ius.v4i1.280>.

- Pah, Gress Gustia Adrian. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Berbadan Hukum dan Bukan Berbadan Hukum." *Jurnal Advokasi* 7, no. 2 (2017): 181–96. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/328/319>.
- Pamungkas, Bagas. "Pentingnya Keselarasan Antara Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Instrumen Hukum dalam Mengatasi Tantangan Ketidakadilan." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 3 (2 Januari 2024): 315–24. <https://doi.org/10.61292/eljbn.84>.
- Pandia, Elsa, dan Elan Jaelani. "Analisis Hague Convention On The Civil Aspects Of International Child Abduction 1980: Tinjauan Terhadap Penanganan Kasus di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 2, no. 3 (30 November 2023): 1–7. <https://doi.org/10.59818/jps.v2i3.681>.
- Panggabean, Mompang L. *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. Diedit oleh Agus Lanang Irawan. Cawang: UKI Press, 2005.
- Panglima, Ahmad Habib, Rinaldy Amrullah, dan Fristia Berdian Tamza. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pelaku Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Penipuan Investasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Terhadap Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst)." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 3 (26 Juni 2025): 63–75. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i3.5250>.
- Parameshwara, Parameshwara, dan Khairul Riza. "Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu* 1, no. 1 (4 April 2023): 25–34. <https://doi.org/10.35912/jasmi.v1i1.1973>.
- Pardede, Alexander Johnatan, Elvira Fitriyani Pakpahan, dan Adella Sitanggang. "Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Atau Corporate Social Responsibility." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (30 Juni 2025): 2000–2009. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1495>.
- Pardede, Marulak. "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (29 September 2020): 335–62. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.335-362>.
- Pariela, Eunike Petra Rebecca, dan Zainal Arifin Hoesein. "Peran Good Governance Risk Management dan Compliance Terintegrasi dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Direksi dan Mencegah Korupsi

- di Perusahaan BUMN.” *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 93–107. <https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5275>.
- Patiung, Felix. “Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Kebijakan Perlindungan Whistleblower Di Kepolisian Indonesia: Studi Kasus Di Polri Samarinda.” *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 9 (2025): 95–107. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i10.665>.
- Patmawati, Novi. “Analisis Ketidakseragaman Regulasi Korporasi di Indonesia: Tinjauan Kritis dan Harmonisasi.” *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 3 (2025): 1–18. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/view/2512/3054>.
- Patty, Junus Paulus. *Transparansi Laporan Keuangan: Pilar Akuntabilitas Perusahaan Publik di Era Digital*. Diedit oleh Jacomina Vonny Litamahuputty. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Paturu, Ika Handayani, dan Aullia Vivi Yulianingrum. “Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 135–157. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.222>.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pub. L. No. 13 (2016).
- Perdana, Erlita Lily Cahya Aulia Putri, dan Gialdah Tapiansari Batubara. “Implikasi Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule terhadap Implementasi Tujuan Hukum.” *UNES Law Review* 7, no. 4 (2025): 1420–34. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i4.2421>.
- Permana, Wahyu Priyanka Nata. “Sinkronisasi Penanganan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Subjek Hukum Korporasi.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 2, no. 1 (2017): 67–89. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i1.10817>.
- Prahassacitta, Vidya. “Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyupan di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 396–420. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1584>.
- Prakarsa, Ragil Surya, Naghita Shalsabilla Putri, Winni Angelia Eka Putri, dan Rani Rahayu. “Asas- Asas Pertanggungjawaban Pidana Korpo-

- rasi." *Jurnal Puan Indonesia* 5, no. 2 (2024): 701–706. <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.307>.
- Prakasa, Ragil Surya, Dinda Azzahra, Putri Mutia, Gamawan Fauzi, Putri Yaldi Olivia, dan Rizki Eka Putra. "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin." *eScience Humanity Journal* 4, no. 2 (2024): 368–76. <https://doi.org/10.37296/esci.v4i2.152>.
- Prakasa, Ragil surya, Husein Husein, Delvia Delvia, Qhas Karina Salsabila, dan Rahmat Syauqi Alif. "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *eScience Humanity Journal* 4, no. 2 (2024): 360–67. <https://doi.org/10.37296/esci.v4i2.150>.
- Prakasa, Ragil Surya, Intan Pratiwi, Dian Utari, Annisa Belva Prima, dan Muhammad Rovi Amerta. "Korporasi SebagaiSubjek Hukumdan Pertanggung-Jawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia." *Journal Puan Indonesia* 5, no. 2 (2024): 718–26. <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.290>.
- Prakasa, Ragil Surya, Maharani Utami Maharani Utami, Chesa Wastsalji-deri, Viola audra Jhunia, dan Intan Wulan Sari. "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Puan Indonesia* 5, no. 2 (2024): 746–755. <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.289>.
- Prameswari, Aghnia Maurizka. "Hukuman Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi." *pracasya-law.com*, 2025.
- Prameswari, Anindytha Arsa, Gerhard Mangara, dan Rifdah Rudi. "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (9 Desember 2021): 1200–1222. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.154>.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.
- Prasetya, Muhammad Djaelani, dan Ratnawati Ratnawati. "Upaya Re-Definisi Korporasi dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 868–83. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Pratama, Agung Putra. "Analisis Politik Hukum Terhadap Penegakan Hu-

- kum Restoratif Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Baru.” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 3 (2025): 895–903. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.8021>.
- Pratama, Arie. *Pengantar Pelaporan Korporat Kontemporer*. Diedit oleh Eko Widiyanto. Jakarta: Kencana, 2021.
- Pratama, Diaz Jorge, Nuraliah Ali, dan Satriya Nugraha. “Studi tentang Implikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi.” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2025): 158–71. <https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.937>.
- Pratama, M. Ilham Wira. “Aspek Pemidanaan Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (11 Juli 2025): 67–80. <https://doi.org/10.35912/jihham.v5i1.4148>.
- Pratama, Nikolaus Adi, dan Elza Qorina Pangestika. “Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 1 (2024): 545–54. <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
- Pratama, T. Andana Harris, Muhammad Ali, dan Fadil Fadil. “Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 611–20. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2672>.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2 Juni 2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Prawoko, Adtila, Ab’dan Syukur, Neni Susilowati, Muhammad Ihsan Musyaffa, dan Fitri Aulia Hannan Nisa. “Proses Penyelidikan, Penyidikan, dan Wewenanganya Dalam Hukum Acara Pidana.” *Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2023): 206–216. <https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim/article/view/961>.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: Utomo, 2009.
- Pujayanti, Luh Putu Vera Astri, Zonita Zirhani Rumalean, Rahmawati Rahmawati, Jalil B, Andri Koswara, dan M. Afrizal. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Diedit oleh Sepriano Sepriano. Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2023.
- Putra, I Made Walesa, Marcus Priyo Gunarto, dan Dahliana Hasan.

- “Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334 Pid. Sus/2020/PN Jkt.Br).” *Media Iuris* 5, no. 2 (2022): 231–58. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.33369>.
- Putrazta, Satriya Aldi. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Sistem Pidana Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 11 (2025): 510–28. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/view/1201/1085>.
- Putri, Alvika Fatmawati Dwi, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 312–24. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324>.
- Putri, Anggreany Haryani. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Pelita* 3, no. 2 (2022): 130–40. <https://doi.org/10.37366/JH.V3I2.1464>.
- Putri, Monica Puspa Dewi Suganda, dan Kurniawan Tri Wibowo. *Hukum Perusahaan Kontemporer*. Diedit oleh Lilis Khalisatul Karimah. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Putri, Rianda Prima. “Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019): 129–34. <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.229>.
- Putri, Tiara Amanda. “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya.” *HukumOnline.com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi-lt5a5ecc109ea26/>.
- Putri, Windy Rizky, dan Rizki Amaliah. “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebakaran Hutan dan Lahan.” *Jurnal Thengkyang* 9, no. 2 (2024): 152–66. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/274/259>.
- Putriasha, Amanda, Citra Nabilah, Eka Faiz Rabbani, Muhammad Luthfi Wahyudi, dan Tugimin Supriyadi. “Pengaruh Kejahatan Keras Putih Terhadap Kehidupan Masyarakat.” *JURMA: Jurnal Riset Manajemen* 2, no. 2 (2024): 309–12. <https://doi.org/10.54066/jurma.v2i2.1977>.
- Raffael, Kynan, dan Mardian Mardian. “Deferred Prosecution Agreement (DPA): Model Keadilan Bagi Korporasi dan Negara dalam Tindak Pi-

- dana Pajak.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2025): 1–19. <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/583>.
- Rahantoknam, Wiska W. R. “Eksistensi dan Kekuatan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.” *Lex Et Societatis* 2, no. 4 (2014): 27–34. <https://doi.org/10.35796/les.v2i4.4667>.
- Rahayu, Dian Anggi, Prastiti Suryaning Ramadhani, Samirah Novel, dan Widya Tri Lestari. “Optimalisasi Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dengan Prinsip Perlindungan Lingkungan.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025): 389–401. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15689233>.
- Rahayu, Setyaning, dan Sidik Sunaryo. “Penerapan Criminal Justice System Yang Humanis Dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembahasan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 129–36. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1370>.
- Rahmania, Auliya. “Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4780–88. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1305>.
- Rahmawan, Mohammad Iqbal, Aminah Aminah, dan Budi Ispriyarso. “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba.” *Jurnal Notarius* 12, no. 2 (2019): 909–23. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29135>.
- Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, Girlie Lipsky Aneira Ginting, Jane Aileen Tedjaseputra, et al. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Diedit oleh Zainal Abidin dan Miko Susanto Ginting. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium.” *Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan)* 2, no. 1 (2013): 39–44. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>.
- Rahmayanti, Nur Aidah, dan Ifrani Ifrani. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4393–4404. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7948>.

- Ramadan, Tubagus Ahmad. "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penerapan Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia." *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, no. 2 (2025): 308–319. <https://ojs.um-palembang.ac.id/index.php/asabiyah/article/view/1356>.
- Ramadhani, Kania Nova, Talita Sembiring, Bungana Br. PA, dan Maulana Ibrahim. "Penerapan Asas Legalitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosia* 1, no. 4 (2023): 267–75. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1469>.
- Ramadhanti, Ivana Rizkika. "Analisis Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Timah Di Bangka Belitung oleh Kejaksaan Agung." *Jurnal Bevinding* 2, no. 1 (2024): 28–43. <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1164>.
- Rambe, Rahmansyah Fadlul Al Karim, Muhammad Aufa Abdillah Sihombing, dan Nurhoneyda Winata P. "Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 1 (30 Juni 2024): 24–31. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182>.
- Ramelan, Yudha. "Penerapan Sanksi Pidana Korporasi Pada Bank dan Implikasinya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (31 Desember 2018): 861–82. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1806>.
- Rasiwan, H. Iwan. *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Diedit oleh Tonny Yuwanda. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Ratmaja, I Gede Sadia Dwi, dan I Putu Edi Rusmana. "Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Indonesia." *Wajah Hukum* 9, no. 2 (2025): 889–99. <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i2.1953>.
- Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 2 (6 Juli 2023): 1–17. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.
- Reksodiputro, Mardjono. "Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru." *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 4 (2021): 693–708. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.566>.
- Religia, Ashar Maulana. "Permasalahan HUKUM Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (24 Oktober 2019): 183–97. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.188-201>.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal Pasal Terpenting*

- dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Renuat, Firdaus, Padrisan Jamba, Anna Andriany Siagian, Yosep Hadi Putra, Hj. Darlisma, Dedi Rismanto, Ragil Surya Prakasa, et al. *Pengantar Hukum Pidana*. Diedit oleh Parningotan Malau. Padang: CV Gita Lentera, 2023.
- Reza, Aulia Ali. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP." *Institute for Criminal Justice Reform*, 2015, 1–44. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Pertanggungjawaban-Korporasi-dalam-Rancangan-KUHP.pdf>.
- Rinwigati, Patricia. *Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?* Diedit oleh Supriyadi Widodo Eddyono. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016.
- Rivai, Harif Amali, dan Hendra Lukito. *Perspektif Budaya Organisasi Dalam Korporasi*. Diedit oleh Dyans Fahrezionaldo, Ikhsanul Anwar, dan Syamsul Hidayat. Padang: Andalas University Press, 2019.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, dan Audyna Mayasari Muin. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Rizkia, Nanda Dwi, Nahdia Nazmi, Yusep Mulyana, Tumian Lian Daya Purba, Hendri Jayadi, Fernando Silalahi, Achmad Surya, Irna Irna, dan Paltiada Saragi. *Hukum Acara Pidana*. Diedit oleh Aas Masruroh. Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2025.
- Rizqulloh, Muhammad Zaidan, dan Yeni Widowaty. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 oleh Korporasi." *Media of Law and Sharia* 5, no. 1 (2023): 34–59. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i1.41>.
- Robinson, Paul H. "Strict Liability's Criminogenic Effect." *Criminal Law and Philosophy* 12, no. 3 (12 September 2018): 1–16. <https://doi.org/10.1007/s11572-017-9435-8>.
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.
- Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana

- Indonesia.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 192–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.
- Rofi'i, Imam, dan Emmilia Rusdiana. “Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Dalam Putusan Nomor 2633/K/Pid.Sus/2018.” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 140–52. <https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.33677>.
- Rohmah, Adinda Syifa'u, Aini Jatsiyah Zulkarnain, dan Pipi Susanti. “Hak Restitusi Bagi Korban Kejahatan Korporasi.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, no. 8 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Rokhim, Abdul. “Degradasi Norma ‘Strict Liability’ Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.” *Yurisprudencia: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (2022): 178–95. <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.14627>.
- Rorie, Melissa. “Responsive Regulation.” In *Oxford Handbooks Online: Criminology and Criminal Justice*, 1–2. Oxford University Press, 2015. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199935383.013.109>.
- Rosyadi, H. Imron. *Hukum Pidana*. Diedit oleh Muhammad Jazil Rifqi. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Roup, Abdul. “Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016.” *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, no. 2 (28 Oktober 2017): 294–322. <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1163>.
- Ruslan, Renggong. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016.
- S, Ujang Charda, Fernando Manggala Yudha S, dan Syaefa Wahyuni. “Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 3051–3061. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10802>.
- Sachruddin, Sachruddin, Yusrianto Kadir, dan Marten Bunga. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 3 (2025): 52–70. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.262>.
- _____. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 3 (2025): 52–70. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.262>.

- Sadat, Anwar, dan Fx. Hastowo Broto Laksito. *Hukum Pidana Dalam Praktek Peradilan Pidana di Indonesia*. Diedit oleh Safarotul Indari. Gresik: CV Global Kreatif Media, 2025.
- Sadino, Sadino, dan Bella Nurul Hidayati. "Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi." *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)* 2, no. 1 (2017): 13–24. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i1.737>.
- Safira, Mirza Elmy. "Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (4 Juli 2023): 1–17. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.9750>.
- Saleh, Jurais. M. "Dari Klausul 'Menguntungkan Korporasi' ke Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 4 (2025): 127–39. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i4.1651>.
- . "Dari Klausul 'Menguntungkan Korporasi' ke Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 4 (2025): 127–39. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i4.1651>.
- Saleh, Roeslan. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Salin, Salin, Muhammad Erham Amin, Ahmad Syaafi, dan Ifrani Ifrani. "Penerapan Prinsip Vicarious Liability Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri." *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* 9, no. 3 (2024): 743–54. <https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/1114>.
- Salwa, Berliana Aisyah Nur, dan Sidik Sunaryo. "Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1956–1964. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1513>.
- Sandesko, Raihan. "Eksistensi maladministrasi bisnis di dalam corporate crime: penyalahgunaan kewajiban hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/748>.
- Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi. "Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi

- dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana.” *Jurnal Humaniora* 3, no. 2 (2012): 422–37. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3342>.
- Saputra, Adit. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi.” *At-Tanwir Law Review* 2, no. 1 (8 Desember 2022): 1–26. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1848>.
- Saputra, Eko. *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia*. Di-edit oleh Ara Caraka. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2025.
- Saputra, Fahreyz Reza, Hafrida Hafrida, dan Herry Liyus. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanaan di Indonesia.” *Jurnal Supremasi* 15, no. 1 (10 Maret 2025): 17–32. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.4178>.
- Saputra, Rian Prayudi, Khairul Hidayatullah, Abdurrahman Abdurrahman, Alfia Roza, Fabrizio Fabrizio, dan Resky Resky. “Analisis Psikologis terhadap Perilaku Hakim dalam Mengambil Keputusan.” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (30 Januari 2025): 414–21. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.99>.
- Saputri, Intan. “Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI).” *Indonesia Notary* 4, no. 17 (2022): 357–71. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/17>.
- Saragih, Handa Yusico, Tofik Yanuar Chandra, dan Santrawan T. Paparang. “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Tata Kelola Niaga Komoditas di Indonesia.” *Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8 (2025): 3705–17. <https://doi.org/10.62335>.
- Sari, Ari Tris Ochtia, dan Edi Pranoto. “Implementasi Sistem Pemasayarakatan Terhadap Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang.” *Jurnal Logika Hukum* 1, no. 1 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.62263/jlh.v1i1.81>.
- Sari, Gholin Noor Aulia, Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Raden Muhammad Muhklasin, Dewi Sulistianingsih, dan Martitah Martitah. “Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan.” *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 3* 3 (2024): 253–90. <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.210>.
- Sari, Indah. “Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum

- Pidana Lingkungan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 64–80. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.404>.
- Sari, Terssia Putri. “Peran Akuntansi Forensik Dalam Mengungkap Kasus Kecurangan Keuangan di Perusahaan Publik.” *Borjuis: Journal of Economy* 2, no. 4 (2024): 231–45. <https://borjuis.joln.org/index.php/home/article/view/48>.
- Satria, Hariman. “Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 25–53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.255>.
- . “Usaha Tanpa Izin Lingkungan: Menilai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 1–11. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/1>.
- Satriya, atur Alfath. “Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan.” PN-kuningan.go.id, 2025. <https://pn-kuningan.go.id/kategori-4-artikel.html>.
- Savira, Devi, Sonny Fransisco Siboro, dan Shalshabila Shafa. “Peran Pengawasan Internal Dalam Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi Sektor Publik.” *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 226–35. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v3i2.2003>.
- Setianingsih, Riskha, Zahrani Fatni Hapsah, Umi Nur Habibah, Diva Viola Natasya Hasibuan, dan Arsyadona A. “Pengaruh Penerapan ISO 31000 Dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Resiko Pada Perusahaan J&T Express.” *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2, no. 4 (2024): 155–59. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14726453>.
- Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen Zulkarnen, Agus Rizal, dan Ibnu Satrio. “Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (27 Oktober 2024): 266–78. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>.
- Setiawan, Hery, Joni Irawan, dan Nina Lestari. “Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2021): 74–88. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.580>.
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, Suci Utami, Ludia Alfafa Faza, Herlina Manullang, Hutrin Kamil, Anis Rifai, Marli Candra, et al. *Politik Hukum Pidana*. Diedit oleh Dian Dewi Khasanah. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

- Setiyono, H. *Kejahatan korporasi : analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- _____. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Setiyono, Setiyono. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 1 (2013): 13–24. <https://doi.org/10.26905/idjch.v18i1.1106>.
- Setiyono, Setiyono, Rini Purwaningsih, dan Achmad Cholidin. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan yang Berdampak Dilampauinya Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup.” *Al-Qisth Law Review* 7, no. 2 (2024): 275–94. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.2.275-294>.
- Setyo, Aji Prabowo, dan Hartawiningsih Hartawiningsih. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Analisa Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt atas nama PT Gemilang Sukses Garmino).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 3 (2024): 227–40. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>.
- Setyo, Eliyas Eko. “Anselm von Feuerbach, Pencetus Konsep Asas Legalitas Nullum Delictum.” Dandapala, 2025. <https://dandapala.com/article/detail/anselm-von-feuerbach-pencetus-konsep-asas-legalitas-nullum-delictum>.
- Shanty, Lilik. “Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi.” *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 56–72. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.401>.
- Shodiq, MD. *Hukum Pidana Perbandingan*. Diedit oleh Mas Putra Zenno. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025.
- _____. *Kebijakan Hukum Pidanas*. Diedit oleh Yati Vitria. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Sidiq, Syahril. “Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (7 Agustus 2023): 39–59. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767>.
- Silaban, Othsme Cloudia Martahan., Dwi Sekar Arum, Alamsyah Bahrul Alam, Rafly Rafdianto, dan Yenny Febrianty. “Analisis Yuridis Seng-

- keta Persaingan Usaha Antara Garuda Indonesia Dan Rolls-Royce Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3231–3243. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i4.1468>.
- Siltor, Andy Narto. “Landmark Decision: Strict Liability Korporasi Atas Kegiatan Usaha yang Berisiko Bagi Lingkungan Hidup.” MARINews, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/strict-liability-korporasi-atas-kegiatan-usaha-0mK>.
- _____. “Tindak Pidana Perpajakan: Subsideritas Pidana Penjara Diterapkan Terhadap Denda Pajak yang Tidak Dibayar.” MARINews, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tindak-pidana-perpajakan-subsideritas-pidana-penjara-0kf>.
- Silvera, Dica Lady, Heriyani Heriyani, dan Sahara Sahara. “Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Tinjauan atas Pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak dan Praktik Manajemen Laba.” *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 4, no. 1 (29 Juni 2024): 35–53. <https://doi.org/10.31933/5dz3ke89>.
- Simanjuntak, Jean Calvijn. *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. Diedit oleh Tim RGP. Depok: Rajawali pers, 2023.
- Simarmata, Marusaha, dan Hudi Yusuf. “Analisis Tindak Pidana Ekonomi Dalam Putusan Nomor 589/PDT.G/2021/PN.Jkt.Br: Implikasi Hukum dan Keadilan Sosial.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 1052–61. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2297/2419>.
- Simatupang, Nursariani, dan Faisal Faisal. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Diedit oleh Doni Iskandar. Medan: Pustaka Prima, 2017.
- Simpson, Sally S. “Criminology and Corporate Crime: The Art of Scientific Cross-Pollination.” *Annual Review of Criminology* 8 (2024): 311–31. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-022422-121435>.
- Sinaga, Kezia Marlinata, Reivania Calista Rizanul, Princess Ngozi Chika, Muhammad Ibaadurrahman, dan Fatkhuri Fatkhuri. “Keterkaitan Antara Kualitas Governance dan Stabilitas Negara: Analisis Perbandingan Antara Negara-Negara Skandinavia dan Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 11 (2024): 53–62. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jikm/article/view/5260>.
- Sinaga, Muhammad Ridho. “Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di In-

- donesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 81–97. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.5538>.
- Sinaga, Roulinta Y, Rini Apriyani, Roli Pebrianto, Sri Rumada Sihite, Arini Asriyani, Lola Yustrisia, Ragil Surya Prakasa, et al. *Tindak Pidana Korporasi*. Diedit oleh Padrisan Jamba. Padang: CV Gita Lentera, 2024.
- Sinurat, Aksi. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Diedit oleh Umbu Lily Pekuwalli. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023.
- SIP Law Firm. "Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia." *siplawfirm.id*, 2024. <https://siplawfirm.id/perbankan-di-indonesia/?lang=id>.
- Sirait, T. Mangaranap. *Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integrak*. Diedit oleh Herlambang Rahmadhani. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Sirait, Timbo Mangaranap. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari Masa Ke Masa*. Diedit oleh Dwi Novidiantoko. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Sirajuddin, Amirullah, Sri Rahayu, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Karolus Kopong Medan, Kornelia M.D. Lewokeda, dan Armstrong Harefa. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Diedit oleh Angga Aldilla Gussman dan Dyana Maftuhatu Rosyidah. Jambi: PT Nawala Gama Education, 2024.
- Siregar, Friska Anggi. "Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbankan." *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 236–252. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i1.1457>.
- Siregar, Padian Adi Salamat. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah*. Diedit oleh Unggul Pebri Hastanto. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Siswanto, Heni. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Meningkatkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 1–16. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.584>.
- Sitepu, Imanuel, Ani Purwati, dan Liza Marina. "Tindak Pidana Korupsi Multinasional Dan Peran Korporasi Global: Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Ekonomi Indonesia." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 6 (2025): 10074–88. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11214>.
- Sitepu, Rida Ista, dan Rudi Hermawan. "Pendekatan Restorative Justice

- Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (20 Juni 2022): 11–18. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.44>.
- Sitepu, Rida Ista, dan Yusona Piadi. “Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (1 Juni 2019): 67–75. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, dan Krusitha Meilan. “Evolusi Kejahatan dan Pemidanaan: Tantangan Dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern.” *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (4 Juli 2025): 87–97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>.
- Situmorang, Kristensen Marihot, dan Merline Eva Lyanthi. “Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Dibawah 500 Juta Dalam Prespektif Keadilan.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025): 571–78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15716283>.
- Situmorang, Olyhabana, dan Roida Nababan. “Mediasi Restoratif Dalam Sengketa Kontrak Bisnis di Perusahaan Multinasional.” *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (29 Desember 2024): 551–64. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4720>.
- Situmorang, Rendy Yanfery, dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dew. “Kewajiban Negara Pengekspor E-Waste Dalam Pasal 9 (2) Basel Convention Sebagai Obligation of Result.” *Jurnal Media akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.62281>.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Diedit oleh Irfan Fahmi. Depok: Kencana, 2017.
- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Diedit oleh Irfan Fahmi. Jakarta: Kencana, 2015.
- _____. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Diedit oleh Irfan Fahmi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Skandiva, Razananda, dan Beniharmoni Harefa. “Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (5 April 2022): 245–62. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.826>.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010.

- Soewarsono, Joko Ismuhadi. *Membongkar Kejahatan Keuangan: Penyelidikan Tentang Manipulasi Pajak dan Pencucian Uang di Dunia Korporat*. Diedit oleh H. KMS Herman. Sumedang: CV Mega Press Nusantara, 2024.
- Sondakh, Marcell. “Perlindungan Korban Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Melalui Mediasi Penal.” *Lex Et Societatis* 2, no. 8 (2014): 159–69. <https://doi.org/10.35796/les.v2i8.6196>.
- Sopandi, Yuda Meizar Pratama. “Mengenal Asas Legalitas dalam Hukum Pidana di Indonesia.” *Dntlawyers.com*, 2022. <https://dntlawyers.com/mengenal-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- Sopiyati, Sopiyati, Syarif Hidayatulloh, dan Ogi Charist M Arifin. “Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam kasus tindakan pidana korupsi.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 454–67. <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.72>.
- Sormin, Yohanes Untung, Bagio Kadaryanto, dan Irawan Harahap. “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Unsur Dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Dalam Putusan Hakim Pada Kasus Kebakaran Lahan.” *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 313–36. <https://doi.org/10.56301/cs.v8i1.1716>.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Diedit oleh Winengku Nugroho dan Safitriyani Safitriyani. Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019.
- _____. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Diedit oleh Emmanuella Regina. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2022.
- _____. *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Diedit oleh Emmanuella Regina. Yogyakarta: Kepel Press, 2023.
- Suartha, I Dewa Made. “Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Materiel Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Yustisi* 4, no. 1 (2015): 235–44. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8640>.
- Sudariyanto, Muhammad Arif. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian.” *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2018): 47–64. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1>.
- Sudaryono, Sudaryono, dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-*

- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. Diedit oleh T. Santosa. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sudibyo, Ateng, dan Aji Halim Rahman. "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana." *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 55–79. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Studi Perilaku Hukum Hakim Bismar Siregar*. Diedit oleh Mompang L. Panggabean. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sudiro, Amad. "Ruang lingkup Tindak Pidana Ekonomi di Bidang Perbankan." *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 3 (1996): 55–71. <https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v3i3.5220>.
- Sugama, Fauzan, Yuli Rahmad, Maidy Ramadhan Az, M. Arif Ridwan, Fahrul Rozi, Abdul Azis, dan Jum'ah Jum'ah. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306–16. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>.
- Sugandi, Dwinta, Winda Fitri, dan David Tan. "Perbandingan Doktrin The Piercing Of Corporate Veil Di Berbagai Negara (Indonesia, Prancis Dan Jerman)." *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 581–98. <https://doi.org/10.31933/0mcmbd28>.
- Sugianto, Fajar, Ellyana Herawati, Hadi Mustopa, Metty Sander, dan Putri Jecika Fujianti. "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 6 (2025): 2819–2831. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i7.32225>.
- _____. "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 7 (2025): 2819–31. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i7.32225>.
- _____. "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 7 (16 Juli 2025): 2819–31. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i7.32225>.
- Sugiyatmo, Agus, Vience Ratna Multiwijaya, dan Aprima Suar. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Penetapan Harga (Price Fixing)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 3211–27. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16392>.

- Suhanda, Rico. "Pertanggungjawaban Pelaku Korporasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa(JPPIM)* 5, no. 1 (2024): 38–43. <https://www.wisnuwardhana.ac.id/jppim/index.php/jppim/article/view/220>.
- Suhariyanto, Budi. "Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 113–30. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.213>.
- _____. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 441–58. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.198>.
- _____. "Restoratif Justice Dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 3 (2016): 421–38. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/issue/view/18/showToc>.
- Suhartanto, Feri Pramudya, dan Yenny Febrianty. "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law." *Konsensus : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 72–83. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i3.218>.
- Sujono, Salsabilla, Dewi Iryani, dan Gradios Nyoman Tio Rae. "Pertanggungjawaban Pidana Direktur Atas Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2025): 496–529. <https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4423>.
- Sukedi, Mochamad, dan I Nengah Nuarta. "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 222–30. <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.2024.222-230>.
- Sulaiman, Ribut Baidi. "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Indonesia Criminal Law Review* 2, no. 1 (2023): 1–18. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol2/iss1/3>.
- Sulistianti, Mia, Kaila Ismail, Syadza Luthfiyyah, dan Asmak Ul Hosnah. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Korupsi Korporasi Di Sektor Migas: Studi Atas Kasus Pertamina Tahun 2018–2025." *Indonesian*

- Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3276–3282. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1475>.
- Sulistiyono, Moh Puji, Adi Saputra Ramadani, Ade Ramadhani, Tomas Apriansa, Tryssa Ananta, dan Rahma Fitri. “Eksistensi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia.” *Indonesian Journal of Law* 1, no. 10 (2024): 274–283. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/846>.
- Sumaryono, E. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Diedit oleh Martino Sardi. Depok: PT Kanisius, 2002.
- Supanto, Supanto. *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Supramono, Gatot. *Pemidanaan Korporasi dan Gugatan Class Action Ganti Rugi Serta Pencabutan Izin Lingkungan Hidup*. Diedit oleh Irfan Fahmi. Jakarta: Kencana, 2022.
- Supriyanta, Supriyanta. “Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2007): 42–52. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/192/158>.
- Surbakti, Feri Antoni, dan Busyra Azheri. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan.” *Nagari Law Review* 8, no. 2 (2024): 338–355. <https://doi.org/10.25077/nal-rev.v8.i.2.p.338-355.2025>.
- Surono, Agus. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Diedit oleh Yuliaris Yuliaris. Depok: UAI Press Universitas Al-Azhar Jakarta, 2016.
- Surya, Ida, dan Abdul Wahab. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 108–17. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.142>.
- Susanti, Dwi Siska, Nadia Sarah, dan Nurindah Hilimi. “Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan.” *INTEGRITAS* 4, no. 2 (10 Desember 2018): 207–32. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.222>.
- Susanti, Emilia. *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Diedit oleh Erna Dewi. Lampung: Pustaka Ali Imron, 2021.
- Susanti, Erna, dan Khristyawan Wisnu Wardana. “Tanggung Jawab Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Risalah Hukum* 1, no. 2 (2005): 20–25. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/115>.

- Susanto, Agung. "Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebelum adanya Ruu KUHP pada Ruu KUHP dan Sistem dari Negara Belanda." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (26 Juni 2022): 125–46. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12734>.
- Susanto, Dinar Agus, Muhammad Haekal Habiebie, dan Budhy Basuki. "Peran Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan Dalam Perdagangan Internasional." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023): 93–108. <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/2129/1229>.
- Susanto, Deny. *Hukum Korporasi di Indonesia Dalam Pendekatan GRC Terintegrasi (Governance, Risk, Compliance)*. Diedit oleh Rulie Gunadi. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Sutopo, Sutopo, Noenik Soekorini, Vieta Imelda Cornelis, dan Hartoyo Hartoyo. "Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/ 2023/PN Sby." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (9 Oktober 2024): 152–57. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1127>.
- Sutrisno, Andri. "Penerapan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Tantangan Teoretis dan Praktis." *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (8 Mei 2025): 78–90. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.611>.
- Sutrisno, Anom. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 17–28. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>.
- Syahird, Ahmad. "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup." *Indonesian Journal Of Education and Humanity* 3, no. 2 (2023): 47–64. <https://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/view/101>.
- Syahlan, Syahlan, dan Parningotan Malau. *Criminal Act, Criminal Liability & Punishment Terhadap Korporasi Dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Khusus, Serta Tantangan Penegakan Hukumnya*. Diedit oleh Melvin Mirsal. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Als. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar*. Diedit oleh Fitri Yanni Dewi Siregar, RAudhatussyifa A'Yuni, dan Nurullah Ibrahim. Jakarta: Prenadamedia

- Group, 2018.
- . *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Diedit oleh Fitri Yanni Dewi Siregar, Raudhatussyifa A'Yuni, dan Nurullah Ibrahim. Jakarta: Kencana, 2019.
- Syahrir, Khairil Andi, M. Said Karim, dan Hijrah Adhyanti Mirzana. "Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Khairil Andi Syahrir*. *Tumou Tou Law Review* 1, no. 1 (2022): 32–47. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/tumoutou/article/view/43633%0A>.
- Syailendra, Moody Rizqy, dan Cindy Laurencia. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 3197–3208. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6511>.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Diedit oleh Ihdi Karim Makinara. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- Syapriallah, Aditia. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Diedit oleh Herlambang Rahmadhani. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tabiu, Ramadan, Heryanti Heryanti, Nur Intan, dan Sahrina Safiuddin. "Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi." *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 99–110. <https://holrev.uho.ac.id>.
- Tambunan, Yudha Yosephin, Muhammad Firdausi, dan Muhammad Rifki Adnan Ramadhan. "Tanggung Jawab Hukum dalam Tata Kelola Perusahaan: Perspektif Direksi dan Komisaris." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1, no. 4b (2024): 2680–2686. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4b.2373>.
- Tampubolon, Manotar, dan Putu George Matthew Simbolon. "Perbandingan Sistem Hukum Inggris Dengan Jerman (Refleksi Terhadap Sumber Hukum Dan Penerapan Hukum Indonesia)." *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (22 Juni 2022): 141–62. <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.11114>.
- Tanjung, Daysiah Nur Fathli, dan Hadi Yusuf. "Pencegahan Kejahatan dan Kebijakan Kriminal Upaya Strategis Menanggulangi Kriminalitas di Indonesia." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 9213–26. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3428/3530>.

- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2017): 191–99. <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.
- Tendean, Meyer. "Korporasi: Konsep, Regulasi dan Implementasi." *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law* 1, no. 1 (2025): 1–15. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiccl/article/view/2842/1929>.
- Tentua, Thessa Lonians Marghareta, Divanny Elisabeth Oktavia Panjaitan, Irma Dwiyaniti, dan Taun Taun. "Kajian Komprehensif terhadap Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP Lama 1946 dan KUHP Baru 2023." *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2, no. 2 (2025): 24–39. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.698>.
- Theotama, Gracella, dan Yesaya Brian Syahputra. "Whistleblowing: Dilema dalam Tekanan Ketaatan dan Tindakan Balasan." *JAB: Jurnal Akuntansi Bisnis* 21, no. 2 (2023): 185–204. <https://doi.org/10.24167/jab.v21i2.10449>.
- Tirtawati, Septi Dyah, dan Pujiyono Pujiyono. "Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021): 112–24. <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1393>.
- Tobing, Clara Ignatia, Indra Lorenly Nainggolan, dan Mareta Della Swastika Putri. *Hukum Pencemaran Lingkungan*. Diedit oleh Syafri Iman-da. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Toruan, Henry Donald Lbn. "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 397–416. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.33>.
- Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pub. L. No. 7 (1955).
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 20 (2001).
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48 (2009).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1 (2023).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang

- Hukum Pidana (KUHP Baru), Pub. L. No. 1 (2023).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pub. L. No. 40 (2007).
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Diedit oleh Tarmizi Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Utami, Dwiyantri, dan Hudi Yusuf. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Ekonomi." *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary* 2, no. 11 (2024): 3497–3521. <https://journal.institiercom-edu.org/index.php/multiple/article/view/628>.
- Utami, Nurani Ajeng Tri, Alef Musyahadah Rahmah, dan Setya Wahyudi. "Kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia Demi Terwujudnya Keadilan." *Soedirman Law Review* 5, no. 2 (26 Agustus 2023): 761–76. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.2.14197>.
- Utami, Tanti Kirana, Sinta Solihah, M. Rizki Maulana, Intan Robiatul Adawiah, dan Muhammad Arif Firdaus. "Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia." *Customary Law Journal* 2, no. 3 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4048>.
- Valerian, Dion. "Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi Analisis Komparatif dengan Foreign Corrupt Practices Act Amerika Serikat, Bribery Act Inggris, dan Wetboek van Strafrecht Belanda." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (2019): 1–19. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.445>.
- Virginia, Erja Fitria, dan Eko Soponyono. "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulungan Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (17 September 2021): 299–311. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311>.
- Wadjo, Hadibah Zachra, Mutiara Nora Peace Hasibuan, Annisa Sabilla Sueni, Yenny Fitri Z, Siti Naidah, Moh Kamaluddin, Rinaldy Amrullah, et al. *Delik-Delik dalam KUHP: Klasifikasi, Unsur dan Analisis Yuridis*. Diedit oleh Chitra Imelda. Padang: CV.Gita Lentera, 2023.
- Wafiya, Wafiya. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2015): 657–80. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323>.
- Wahid, A. M Yunus. *Pengantar Hukum Lingkungan Edisi Kedua*. Diedit

- oleh Suwito Suwito. Jakarta: Kencana, 2018.
- Wahid, Abdul. "Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (25 Februari 2023): 34–51. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5130>.
- Wahyono, Wahyono, dan Cahyo Cahyo. "Pertanggungjawaban Direksi dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Studi Kasus Korporasi Multinasional." *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (15 Mei 2025): 145–51. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.634>.
- Wahyudi, Imam Tri, Wahyu Anggara, dan Muhammad Rizky Zein. "Tinjauan Kebijakan Importasi Limbah di Indonesia." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 4, no. 1 (2 Juli 2020): 69–85. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i1.739>.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Diedit oleh M Rizqi Azmi. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wala, Gevan Naufal. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Melalui Transparansi Pelaporan Keuangan: Perspektif Hukum Pasar Modal." *Dinasti Accounting Review* 1, no. 4 (2024): 156–63. <https://doi.org/10.38035/dar.v1i4>.
- Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (15 September 2012): 479–89. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>.
- Wasistha, Chairunnisa Hewi. "The Role Of Mass Media In Building An Anti-Corruption Culture In Society." *JIC : Jurnal Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (30 Maret 2025): 49–63. <https://doi.org/10.64272/drahb645>.
- Weno, Angreini Wiranti, Harly Stanly Muaja Muaja, dan Frits Marannu Dapu. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Ahli Hukum Pada Perusahaan dan Kaitannya Dengan Pembatasan Aksi Korporasi." *Lex Administratum* 13, no. 2 (2025): 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/61041/48983>.
- Weriansyah, Aditya, Matheus Nathanael Siagian, Aisyah Assyifa, Alexander Tanri, Arianda Lastiur Paulina, dan Sri B. Praptadina. *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*. Diedit oleh Siska Trisia. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024.
- Wibisana, Andri G. "Kritik atas Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi dalam RKUHP." *Humas FHUI*, 2022. <https://law.ui.ac.id/18735-2/>.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Guru Besar FHUI Kritisi Kekeliruan Strict Li-

- ability dan Sanksi dalam RUU Cipta Kerja.” Law.ui.ac.id, 2025. <https://law.ui.ac.id/guru-besar-fhui-kritisi-kekeliruan-strict-liability-dan-sanksi-dalam-ruu-cipta-kerja/>.
- Wibisono, Gunawan, Ferdi Ferdi, dan Fitriati Fitriati. “Implementasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 190/Pid.Sus/2016/PN/Pmn dan Putusan No. 90/Pid.Sus/2017/PT.Pdg).” *UNES Journal of Swara Justisia* 2, no. 4 (2019): 376–87. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/79/51>.
- Wibowo, Agus, Dg. Mapata, Rudi Setiadi, Abd. Kholik Khoerulloh, Elok Bakti Pratiwi, Dina Indriyanti, Agam Ramadika, et al. *Pendidikan Antikorupsi*. Diedit oleh Rintho Rante Rerung. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2025.
- Wicaksono, Yonathan Parlinggoman, Tomi J.E Hutasoit, dan Lindryani Sjoifan. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Hukum Terhadap Praktik Perbankan Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (28 Juni 2025): 2129–37. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1221>.
- Widayati, Lidya Suryani. “Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 1–24. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>.
- Widhianta, Vincentius Dhanang, Supanto Supanto, dan Sapto Hermawan. “Relevansi Konstruksi Pasal Pencemaran Nama Baik Sebagai Sarana Strategic Lawsuit Againsts Public Participation (SLAPPS) Dalam Konflik Lingkungan Hidup.” *Recidive* 3, no. 3 (2014): 345–55. <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i3.40541>.
- Widijowati, Dijan, dan Halim Darmawan. *Pembaharuan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi*. Diedit oleh Syafri Imanda. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Widiyono, Try. “Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam UU PT Dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya.” *Lex Jurnalica* 10, no. 1 (2013): 26–39. <https://doi.org/10.47007/lj.v10i1.350>.
- Widjaja, Gunawan, dan Handojo Dhanudibroto. “Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintah dan Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1323–32. <https://doi.org/10.54443/>

sibatik.v4i7.2945.

- Widjaja, Gunawan, dan Januar Agung Saputera. “Harmonisasi Implementasi Perjanjian Internasional di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Pengaruh Ratifikasi Traktat Global Terhadap Sistem Hukum Nasional.” *Journal of Law and Nation* 4, no. 1 (2025): 124–31. <https://lawinsight.net/index.php/SOLICLAW/article/view/12/12>.
- Widyaastuty, Rini, Sontayati Sihite, dan Fauziah Lubis. “Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3738–51. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4>.
- Widyastuti, Tiya Vika. *Problematisasi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Perdagangan Internasional*. Diedit oleh Nur Khasanah. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Widyawati, Anis, Dian Latifiani, dan Heru Setyanto. “Urgensi Pengaturan Pengawasan Pelaksanaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 2, no. 1 (2023): 90–122. <https://doi.org/10.15294/hp.v1i2.163>.
- Wijaya, Andrew, dan Widyawati Boediningsih. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Ekonomi yang Merugikan Keuangan Negara.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2246–56. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>.
- Willyams, Flugencius Janssen, dan Hudi Yusuf. “Tindak Pidana Ekonomi Dalam Perdagangan: Analisis Hukum dan Perlindungan Konsumen di Indonesia.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 888–97. <https://doi.org/https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/2269/2325>.
- Winatasya, Maulidya, dan Citra Dwi Rahayuningsih. “Hukum Pidana: Kajian Literature Review.” *Journal of Literature Review* 1, no. 1 (27 Juni 2025): 154–60. <https://doi.org/10.63822/nrtk1447>.
- Wiratama, Muh. Adhitya. *Tindak Pidana Kejahatan Korporasi di Indonesia*. Indramayu: Penerbit Adab, 2025.
- Wisnubroto, Al, dan G. Widiartana. *Menuju Hukum Acara Pidana Baru*. Diedit oleh Yudi Yudi dan Retno Widiyani. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.
- Wuisan, Rico. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana” IX, no. 2 (2020): 23–27.
- Wulandari, Sri. “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga

- Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan.” *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2 (2012): 131–42. <https://doi.org/10.36356/HDM.V9I2.303>.
- Yanto, Andri, dan Faidatul Hikmah. “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas.” *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (2023): 81–91. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Diedit oleh Abah Abah. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Yasin, Salsabila Fildza, Syamsul Alam, dan Sutiawati Sutiawati. “Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi.” *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 20–29. <https://doi.org/https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1441>.
- Yoel, Siciliya Mardian, F.X Joko Priyono, dan F.X Adji Samekto. “Pembahasan Hukum Lingkungan Nasional dalam Perspektif Keadilan Lingkungan.” *DIVERSI : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2024): 490–523. <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i2.7471>.
- Yohanes, Willy, dan Hudi Yusuf. “Dampak Tindak Pidana Ekonomi Khusus Terhadap Investasi Asing: Analisis Kasus Kejahatan Korporasi di Sektor Industri.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 5095–5111. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1421/1566>.
- Yoserwan, Yoserwan. *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya Dalam Hukum Pidana Ekonomi)*. Diedit oleh Syamsul Hidayat. Padang: Andalas University Press, 2019.
- Yoserwan, Yoserwan, dan Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Diedit oleh Risty Mirsawat. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Yumanto, Bina, dan Paruhum Aurora Sotarduga Hutaauruk. “Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak: Teori dan Praktik.” *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–149. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.259>.
- Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Yunus, Riski, Roy Marthen Moonti, Nurmin K Martam, dan Muslim A Kasim. “Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi.” *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 70–85. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.660>.

- Yusni, Muhammad, dan Bisdan Sigalingging. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Rangka Untuk Deterrence Effect Dan Effective Detterence." *Juris Studia: Jurnal Kajian hukum* 5, no. 2 (2024): 425–37. <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.633>.
- Yusuf, Niken Yulian. *Tindak Pidana Pertambangan di Hutan Lindung: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukumnya*. Bojong: PT Nasya Expanding Management, 2025.
- Zaenudin, Zaenudin, Putri Fatma Fadilah, dan Rindi Dwi Putri. "Good Corporate Governance dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional: Upaya Penanganan Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Multinasional melalui Tinjauan Literatur." *SJEE (Scientific Journals of Economic Education)* 9, no. 125–129 (2025). <https://doi.org/10.33087/sjee.v9i1.214>.
- Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Diedit oleh Tarmizi Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zhafran, Muhammad Abyan, Saipuddin Zahri, dan Erli Salia. "Penerapan Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 109–17. <https://doi.org/10.54621/jiam.v12i1.1022>.
- Zhou, Valerie. "Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Rio Law Jurnal* 6, no. 2 (2025): 1074–86. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1866>.
- Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lemabga Adat di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, no. 2 (2010): 182–203. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20333946&lokasi=lokal>.
- _____. *Restorative Justice: Gerakan Sosial Masyarakat Global Dalam Upaya Memulihkan Keadilan*. Diedit oleh Eva Achjani Zulfa. Jakarta: UI Publishing, 2024. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920564125&lokasi=lokal>.
- Zultaqawa, Zeis, Mohamad Donie Aulia, Yaumi Sidik Ginanjar, Chepi Ali Firman Zakaria, dan Dey Ravena. "Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Jalan Tol MBZ." *Res Nullius Law Journal* 7, no. 1 (2025): 12–22. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.14599>.

PARA PENULIS



Dr. Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum., adalah seorang akademisi dan praktisi hukum yang saat ini menjabat sebagai dosen tetap di Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam (UIB). Ia memiliki keahlian dalam bidang tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korporasi. Dr. Triana menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas Islam Bandung pada tahun 2002, kemudian melanjutkan studi Magister Hukum Bisnis di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada tahun 2006, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2015 di universitas yang sama. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi dan lembaga hukum, termasuk sebagai pendiri Lembaga Bantuan Hukum untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta menjadi Tenaga Ahli di Dewan Pertimbangan Presiden RI pada tahun 2024.

Sebagai seorang peneliti, Dr. Triana Dewi Seroja menghasilkan karya-karya ilmiah yang berfokus pada perkembangan hukum kontemporer, salah satunya adalah artikel mengenai “*Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Deteksi dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Potensi dan Tantangan Hukum*”. Penelitiannya ini mengeksplorasi penggunaan teknologi AI dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan pencucian uang, sebuah topik yang semakin relevan dengan berkembangnya teknologi di sektor hukum. Artikel tersebut mengkaji potensi AI untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum, namun juga membahas tantangan yang muncul dari sudut pandang hukum, seperti masalah privasi dan tanggung jawab hukum yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi ini.

Selain karier akademiknya, Dr. Triana juga berperan aktif dalam bidang hukum praktis. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Legal Nuti-

zen.com dan mendirikan Pusat Mediasi Internasional Jakarta (JIMC). Dr. Triana juga berpengalaman sebagai Tenaga Ahli dalam berbagai lembaga, termasuk di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dan Dewan Pertimbangan Presiden. Keahlian dan pengalamannya yang luas menjadikannya sosok yang berpengaruh di dunia hukum Indonesia, baik dalam praktik maupun pendidikan. Dengan berbagai kontribusi tersebut, Dr. Triana Dewi Seroja terus memberikan dampak positif dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama di bidang hukum pidana ekonomi dan korporasi.



Emiliya Febriyani, S.H., M.H., adalah dosen pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam sejak tahun 2022 hingga saat ini. Minat keilmuannya berfokus pada hukum pidana dan kejahatan ekonomi, khususnya tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, hukum pidana lingkungan, tindak pidana korupsi, kriminologi dan viktimologi, serta pengantar

ilmu hukum. Dalam peran akademiknya, penulis aktif mengajar dan mengembangkan kajian hukum pidana yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Penulis meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2017 sebagai lulusan terbaik dengan predikat *cum laude*. Pendidikan magister ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan diselesaikan pada tahun 2021, kembali dengan predikat *cum laude*. Saat ini, penulis sedang melanjutkan studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dengan beasiswa penuh dari Universitas Internasional Batam.

Sejak masa mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan pengembangan intelektual, antara lain dewan legislatif mahasiswa, klub debat dan penulisan hukum, serta bidang riset dan pengembangan lembaga dakwah kampus. Penulis juga menorehkan berba-

gai prestasi akademik dan nonakademik di tingkat kampus, lokal, hingga nasional, khususnya dalam bidang debat, pidato, dan penulisan. Hingga kini, penulis aktif menulis opini hukum untuk dimuat di harian koran dan saat ini sering dipublikasi di laman resmi Universitas Internasional Batam. Penulis sejak dulu juga terlibat aktif dalam berbagai kepanitiaan. Selain berkegiatan di kampus, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan hingga saat ini.



Antony, S.H., M.H., adalah asisten peneliti di Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam (UIB), Indonesia. Kepakaran beliau berfokus pada bidang hukum pidana korporasi, dengan minat kajian yang meluas pada hukum tindak pidana ekonomi dan hukum siber. Beliau menempuh pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Internasional Batam pada tahun 2020, kemudian memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.) di universitas yang sama pada Tahun 2024. Pendidikan Magister Hukum (M.H.) diselesaikan di Universitas Internasional Batam pada tahun 2025.

Sebagai akademisi, beliau aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah, dengan puluhan karya ilmiah nasional dan internasional. Beberapa karya pentingnya, antara lain: *“Legal Reform in Indonesia’s Response to the Digital Manipulation Era: A Responsive Legal Theory Approach”* (2026); *“Employment or Exploitation? A Legal Comparative Study of Domestic Worker Protection in Singapore and Indonesia”* (2025); *“Dari Kolonial Ke Konstitusional: Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia dengan KUHP Nasional”* (2025); *“Building Deliberative Democracy In Indonesia: Democracy Future and The Future of Democracy”* (2025); *“State Accountability And Legal Responsiveness In Preventing Diabetes Mellitus From An Early Age: Between Moving Towards A Golden Indonesia Or An Anxious Indonesia”* (2024); *“Exploring the Roots of Political Dynasties from the Perspective of the Democratic System: Legal and Political Reform as a Balance in Election Contestation”* (2024); *“Corruption and development sustainability:*

The implications of artificial intelligence as a tool to eliminate corruption in the Era of Society 5.0 in Riau Province” (2024); “Virality as the New Face of Law Enforcement in Indonesia: Between Legal Awareness and Legal Feelings” (2024). Dengan pengalaman akademik dan riset yang luas, beliau terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum yang adaptif terhadap dinamika dan tantangan global, khususnya bidang hukum pidana, serta mendorong penguatan kajian hukum yang progresif.

KENCANA

PARADOKS PENJARA TAK BERDINDING

Menjerat Korporasi di Antara
Legalitas dan Realitas

Dalam konteks meningkatnya kompleksitas kejahatan korporasi modern, buku ini menyajikan kerangka analitis yang kuat, mulai dari konsep dasar hukum pidana hingga dinamika pertanggungjawaban hukum terhadap entitas non-individu.

Buku ini hadir sebagai sebuah karya ilmiah yang unggul dalam mengupas kompleksitas tindak pidana korporasi, yang selama ini kerap terpinggirkan dalam kajian hukum pidana konvensional. Dengan pendekatan multidisipliner dan argumentasi yang kuat, buku ini memadukan teori hukum pidana dengan dinamika praktik di lapangan. Pembaca akan menemukan pembahasan yang sangat perinci mulai dari dasar-dasar konseptual hingga pendekatan kontemporer seperti *restorative justice*, menjadikan buku ini sebagai referensi komprehensif dan otoritatif dalam bidangnya. Keunggulan utama buku ini terletak pada struktur analisis yang sistematis dan mendalam. Buku ini menawarkan peta jalan menuju sistem hukum yang lebih adil dan akuntabel. Dengan menyajikan kritik yang tajam terhadap kelemahan regulasi nasional serta memberikan solusi berbasis pengalaman internasional, buku ini tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga mendorong pembaruan hukum pidana korporasi di Indonesia secara substansial.

Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya penting bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil dan penggiat keadilan sosial, serta korporasi itu sendiri.



Penerbit
PRENADA
[Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP]
Email: pmg@prenadamedia.com
<http://www.prenadamedia.com>

